

Gerbatama

Produk Pers Suara Mahasiswa UI

Ini UI!

02

Merogoh Impian dalam
Kocek: Komersialisasi
Pendidikan oleh
Bimbingan Belajar?

17

Revisi Statuta UI,
Suramnya Masa Depan
Kampus Kuning

The

Untold
Story

f UI



EDITORIAL

Sebagai salah satu bagian dari sivitas akademika Universitas Indonesia (UI), barangkali hampir setiap kita bangga dengan almamater kita. Perguruan tinggi ternama dengan sederet prestasi gemilang yang tidak terhitung dan tidak terpungkiri. Tampil sebagai salah satu wajah pendidikan Indonesia, secara konsisten UI mempertahankan kualitas dan predikat-predikat terbaiknya. Selama ini, UI merupakan tempat kita diasah dan diasuh oleh berbagai tenaga pendidik yang cerdas, berbudi luhur, inspiratif, dan profesional. Sayangnya, ada terang, ada pula gelapnya. Di balik gilang-gemilang penghargaan, terdapat sisi lain yang tidak kita inginkan dan menjadi catatan evaluasi untuk kita semua, sivitas akademika yang tinggal dan tumbuh disini.

Di antaranya tentang celah politisasi pendidikan yang mengancam akar independensi pohon ilmu pengetahuan yang senantiasa kita jaga. Pun fakta bahwa tidak semua mahasiswa menaati moralitas akademik sehingga mengotori mata air ilmu yang

kita teguk untuk kehidupan. Selain itu, Suara Mahasiswa UI juga menghadirkan inspirasi-inspirasi yang mungkin terlewat, juga beberapa informasi harian yang dapat berguna untuk mengarungi kehidupan perkuliahan.

Sebagaimana kelas perkuliahan, ruang kecil sekretariat Suma UI juga tempat belajar. Gerbatama bukan hanya tentang buletin, tetapi juga arsip abadi dari pembelajaran kami. Informasi-informasi yang tersaji di sini mengalir dari rekaman wawancara, fotografi, reportase, data riset, dan tentunya hasil bolak-balik kos dan Pusgiwa UI.

Karena kami meletakkan jiwa pada tiap kata yang kami rajut, kami ingin pembaca mengetahui bahwa: kami merampungkan tulisan ini dengan semangat dan harapan-harapan baik yang tak terbandung untuk UI. Oleh karena itu, semoga pesan-pesan ini dapat tersampaikan dengan baik pula.

STRUKTUR SUARA MAHASISWA UI 2022

Pemimpin Umum:
Syifa Nadia Rahmawati

Sekretaris Umum:
Fila Kamilah

Bendahara Controller:
Afifa Ayu

Bendahara Treasurer:
Cyndi Juita Rindu

Pemimpin Redaksi:
Dian Amalia Ariani

Redaktur Pelaksana Hardnews:
Kamila Meillina

Redaktur Pelaksana Softnews:
Ninda Maghfira

Redaktur Pelaksana Cetak:
Magdalena Natasya

Wakil Redaktur Pelaksana Cetak:
Humairah Nur Ramadilah Kurnia

Kepala Desk Sosial-Politik:
Wahyu Nurul

Kepala Desk Seni Budaya:
Sekar Arum Ayu Wardhani

Kepala Desk IPTEK:
Intan Eliyun

Kepala Desk Gaya Hidup:
Fitri Hasanah

Kepala Divisi Humas:
Ozora Noor

Wakil Kepala Divisi Humas:
Nahla Syauva Fillah

Kepala Divisi Perusahaan:
Haitsam Sidqy

Wakil Kepala Divisi Perusahaan:
Johanna Wiguna

Wakil Kepala Divisi Perusahaan:
Salfa Nafisa

Kepala Bidang Creative Marketing:
Farah Nabilla Irfan

Wakil Kepala Bidang Creative Marketing:
Getrisia Gunawan

Kepala Divisi Penelitian & Pengembangan:
Dimas Rama

Wakil Kepala Divisi Penelitian & Pengembangan:
Aura Annisa

Kepala Divisi PSDM:
Luthfi Sadra Sirozy

Kepala Divisi Desain, Tata Letak, & Pracetak:
Emir Faritzky

Wakil Kepala Divisi Desain, Tata Letak, & Pracetak:
Fathi Hajrian

Pemimpin Redaksi AVIS:
Anggara Alvin Imansyahputra

Kepala Bidang Fotografi:
Mikail Arya J. M

Wakil Kepala Bidang Fotografi:
Muhammad Faiz Mudrika

Kepala Bidang Videografi:
Justin Amudra P.

Wakil Kepala Bidang Videografi:
Caecilia Hartoko

Kepala Bidang Podcast:
Muhammad Daffa Syuhada

Wakil Kepala Bidang Podcast:
Dendi Adrian

STRUKTUR REDAKSI BULETIN GERBATAMA 89

Pemimpin Redaksi
Dian Amalia Ariani

Redaktur Pelaksana
Magdalena Natasya
Humairah Nur Ramadilah Kurnia

Reporter
Aisha Afdanty Ferkin
Allya Shafira Vizzardhy
Aulia Maulida Az-Zahra
Aurizza Amanda Puteri
Dian Amalia Ariani
Dyaning Pramesti Putri
Fadhila Afrina
Farrell Charlton Firmansyah
Khadijah Putri Rahmadewi
Khoiril Akmal W.
Loga Prity Dewi
M. Qhisyam
Muhammad Rifaldy Zelan
Salma Rihhadatul Aisy
Siti Sahira Aulia
Syifa Nadia Rahmawati
Vanya Annisa
Zakiya Rozqi Auliya

Penelitian dan Pengembangan
Andita Junia
Dimas Rama Satrio Wibowo
Farhani Ade Pratiwi
Muhammad Rafli Gebrena
Nafis Abiu Wira Negara
Nararya Prima Baswara
Qaulan Maruf Indra
Wanda Muhamad Ramadhan

Fotografer
Anggara Alvin Imansyahputra
Almas Satria Bimantara
Farrell Rafif Adli
Ibrahim Rijal
Muhammad Faiz Mudrika
Muhammad Farhan Nuzhadiwansyah

Desain, Tata Letak, dan Pracetak
Brilian Kesumanegara
Emir Faritzky S. N
Lazuarda Pramudita A.
Riska Haniyah Rusadi
Shafira Sarah Saffa

Perusahaan
Amrita Deviayu Tunjungbiru
Dio Aulia Akhmad
Siti Najwa Syahdryani Syifandari

DAFTAR ISI

- 02 LIPUTAN UTAMA**
Merogoh Impian dalam Kocek: Komersialisasi Pendidikan oleh Bimbingan Belajar?
- 07 FEATURE**
Joki di Balik Tugas: Jalan Pintas Selesaikan Tugas di Kampus Kuning
- 11 KOMIK**
Free Rider
- 12 RESENSI**
Refleksi Nilai Humanisme di Tengah Himpitan Pendidikan Konvensional
- 14 CETERA**
Kisah Mereka: Perjalanan Menentang Stigma
- 17 LIPUTAN UTAMA**
Revisi Statuta UI, Suramnya Masa Depan Kampus Kuning
- 24 FEATURE**
Refleksi Dua Tahun Kampus Merdeka
- 28 JELAJAH**
Jelajahi Makanan Legendaris di UI, Sudah Pernah Coba Belum?
- 30 LIPUTAN KHUSUS**
Sekat-Sekat Gerakan Rakyat: Barisan Mahasiswa Milik Siapa?
- 34 GALERI FOTO**
Menyambangi 5 Sudut Tersembunyi UI
- 35 OPINI**
Eksklusivitas Pergerakan Mahasiswa di Indonesia
- 36 KOLOM SASTRA**

Merogoh Impian dalam Kocek: Komersialisasi Pendidikan oleh Bimbingan Belajar?

Ditulis oleh: Aurizza Amanda Puteri
Kontributor: Fadhila Afrina, Vanya Annisa

"Ikut bimbel di mana buat persiapan tes? Anak tante bimbel di ruang sukses, lho-"

Demikian bunyi pertanyaan yang begitu familiar didengar bagi para lulusan SMA dan setingkat dari para teman sebaya, kerabat, hingga tetangga. Menjelang musim kelulusan, baik pelajar SMA maupun keluarganya seringkali heboh dengan persiapan menuju seleksi perguruan tinggi negeri yang ketat. Kendati demikian, merujuk data Menristekdikti pada tahun 2020, hanya sekitar 34% siswa SLTA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Ekonomi jadi salah satu alasan utama. Perguruan tinggi negeri memiliki kursi mahasiswa yang terbatas, sedangkan perguruan tinggi swasta rata-rata harganya melambung jauh melewati keterjangkauan ekonomi masyarakat pada umumnya. Selain ekonomi, kualitas dan nama baik universitas jadi salah satu pertimbangan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih sangat timpang, sehingga terdapat segelintir sekolah atau universitas yang diidam-idamkan semua orang. Tidak heran, jutaan pelajar Indonesia berlomba-lomba mengejar beberapa perguruan tinggi dengan biaya yang murah dan

terakreditasi A. Setidaknya, dua hal ini (jika tidak ada yang lain -red) yang menjadi alasan utama persaingan menuju perguruan tinggi di Indonesia sangat ketat dan berat.

Perjuangan memperebutkan kursi di perguruan tinggi negeri membuat banyak siswa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Salah satu cara paling umum adalah dengan mengenyam pendidikan tambahan melalui bimbingan belajar (bimbel). Bimbel adalah kelas pelajaran tambahan yang diadakan di luar jam sekolah. Berdasarkan hasil survei Suara Mahasiswa UI terhadap 87 responden mahasiswa Universitas Indonesia, sebanyak 93,1% responden mengaku mereka menggunakan jasa bimbingan belajar saat mempersiapkan tes seleksi masuk perguruan tinggi. Adapun, transisi digital di masa pandemi juga menyebabkan berbagai jenis sesi pembelajaran bimbel bermunculan, mulai dari bimbel yang dilakukan secara daring hingga bimbel berbasis karantina dengan protokol kesehatan intensif. Selain itu, vendor yang digunakan juga variatif, dengan Zenius (bimbel daring) dan Inten (bimbel luring)

sebagai dua bimbel dominan yang digunakan oleh para responden, yakni sebanyak 81,5% responden.

Laris manisnya bisnis ini sebenarnya adalah akar panjang dari kualitas pendidikan Indonesia yang timpang dan buruk. Hal ini bersandar pada survei Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan bahwa sistem pendidikan di Jakarta tertinggal 128 tahun daripada sistem pendidikan di negara-negara maju. Riset itu menunjukkan kurang dari 1% orang di Jakarta usia 16-65 tahun yang memiliki kompetensi membaca dan berhitung tingkat tinggi. Riset ini difokuskan di daerah Jakarta, tentu angka ketertinggalannya jauh lebih tinggi jika kita meneliti pendidikan daerah yang memiliki keterbatasan sarana prasarana Dengan kualitas pendidikan yang rendah, tidak heran jika para pelajar membutuhkan kelas tambahan untuk persiapan seleksi perguruan tinggi yang sedemikian ketat.

Sayangnya, privilese untuk dapat mengenyam pendidikan ekstra berupa bimbel bukan "makanan" yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan

kalangan. Dengan demikian, kompetisi untuk mendapatkan hak belajar di perguruan tinggi sebenarnya bukanlah jalur kompetisi yang adil. Ada hak pendidikan yang hilang karena ketimpangan struktural ekonomi dan kualitas pendidikan yang rendah. Dengan kata lain, mereka yang mampu duduk di atas ruangan belajar ber-AC dengan biaya fantastis dalam bimbel setidaknya adalah mereka yang memiliki kelebihan finansial. Dengan demikian, semakin mudah pula bagi mereka untuk mempertahankan privilese yang dimilikinya—masuk ke kampus impian, bergaul dalam lingkungan 'orang-orang pintar', dan menikmati indahnya pendidikan berkualitas.

Para pemilik modal yang mampu melihat potensi pendidikan sebagai komoditas pasar memanfaatkan rendahnya kualitas pendidikan formal di Indonesia sebagai sumber laba, sehingga terjadi fenomena komersialisasi pendidikan.

Menurut Agus Wibowo (2008), komersialisasi pendidikan mengacu pada lembaga pendidikan dengan program pembiayaan sangat mahal, sehingga hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat. Salah satu gejala komersialisasi pendidikan terlihat dari beberapa franchise bimbingan belajar yang menjual impian diterima PTN favorit dengan harga fantastis lengkap disertai jaminan kelulusan, bahkan hingga menyematkan nama perguruan ting-

gi negeri terkait tanpa afiliasi yang jelas. Menjamurnya lembaga bimbel akibat permintaan yang meningkat tentu menyulitkan adanya kontrol kualitas—tidak semua bimbel mengutamakan kualitas pendidikan yang diberikan pada murid bimbingannya. Bahkan, apabila kualitas pendidikan yang diberikan sesuai dengan harga yang ditawarkan, masih ada permasalahan soal akses—hanya segelintir kalangan murid dengan kenyamanan ekonomi yang dapat mendapatkan kursi di bimbel yang digadang-gadang menjadi 'kunci sukses masuk PTN!'.

Terkait pembiayaan, fakta lapangan berdasarkan survei Litbang Suara Mahasiswa UI secara mengejutkan mengungkapkan bahwa para pelajar bersedia merogoh kocek dalam-dalam untuk bimbel, yakni lebih dari delapan juta rupiah pada 43,2% responden yang diikuti dengan rentang biaya empat hingga delapan juta rupiah oleh 21% responden. Bagaimana sebenarnya perspektif para pihak terkait—pelajar, orangtua pelajar, hingga bimbingan belajar sendiri terkait fenomena ini?

Demi Pendidikan Berkualitas, Ada Harga Ada Rupa?

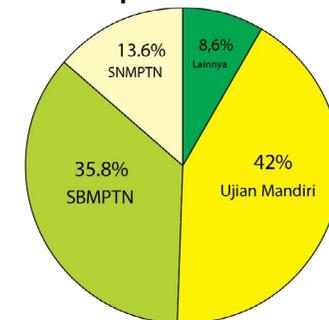


Diagram: Jalur masuk UI yang ditempuh responden*

"Gue milih tempat bimbel tersebut karena beberapa alasan, yang pertama fasilitasnya yang sebanding dengan harganya, tenaga pengajar yang lebih friendly dan juga karena klaim dari bimbel tersebut bahwa telah terbukti meloloskan ratusan ribu siswa ke PTN,"

- Sari, Mahasiswa UI**

Sari mengklaim bahwa pengalamannya di bimbel tersebut sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal fasilitas yang disediakan untuk menunjang proses pembelajaran, seperti aplikasi yang memuat soal-soal SBM-PTN serta pembahasannya.

Selain fasilitas, salah satu tawaran lembaga bimbel yang cukup meyakinkan adalah jaminan masuk universitas, jika tidak maka uang bimbel dapat dikompensasi atau dikembalikan. Senada dengan yang diutarakan Sari dan Rudi, tampaknya klaim jaminan hasil ternyata cukup mempengaruhi pertimbangan siswa dalam memilih bimbingan belajar. Baik Sari dan Rudi (nama disamarkan) mengatakan bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan selama uang jaminan dapat dikembalikan apabila hasil tidak sesuai dengan apa yang dijamin.

Pasca ujian dan lulus, Rudi mengaku bahwa bimbel sangat mempengaruhi performanya dalam mengerjakan soal-soal seleksi perguruan

*Data berasal dari survei Suara Mahasiswa UI

**Nama samaran salah satu responden Suara Mahasiswa UI



Ilustrasi: Shafira Sarah Saffa

tinggi. “Cukup besar, karena waktu aku ikut SIMAK UI memang ada beberapa soal yang persis dan sudah aku pelajari waktu di bimbel X, terutama Bahasa Indonesia, Sejarah, Ekonomi, dan Sosiologi,” terang Rudi mengenai keakuratan soal yang diberikan.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Rudi seakan mendukung premis bahwa bimbel—pada umumnya—hanya membantu para siswa untuk dapat mengerjakan soal se-

cara cepat dan tepat, bukan untuk memahami suatu persoalan secara mendalam. Beberapa bimbel bahkan disinyalir secara diam-diam memberikan bocoran dari soal yang akan diujikan, entah dari mana sumbernya. Kendati demikian, tenaga pengajar juga berperan signifikan dalam membantu mahasiswa memahami soal-soal yang diprediksi akan keluar saat tes masuk perguruan tinggi.

“Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing sih, mi-

salnya cara kita memahami suatu materi serta rajin atau tidaknya kita mengerjakan latihan soal yang diberikan, mengikuti progres, dan menghadiri setiap kelas,” tambah Rudi. Sejalan dengan pendapat Rudi, Sari berpendapat bahwa bimbel bukanlah kunci keberhasilan utama, melainkan tempat untuk memberikan suasana yang kondusif untuk belajar. “Menurut gue bimbel itu hanya sebagai tempat gue untuk meraih semangat, selebihnya itu dari

kemauan pribadi. Walaupun fasilitas lengkap, tapi tanpa niat diri sendiri, bakalan sia-sia,” tegas Sari.

Afiliasi PTN dalam Bimbel Persiapan Tes Perguruan Tinggi

Dari perspektif penyedia bimbel, Suara Mahasiswa UI berkesempatan mewawancarai salah satu pihak penyedia bimbel yang cukup ternama yakni Pejuang UI. “Kalau ditanya tujuannya apa, ya kita pengen mengantar adik-adik peserta, khususnya awalnya dari luar Jawa yang ingin kuliah di PTN Jawa,” jelas Wicaksono, perwakilan bimbel Pejuang UI.

Ketika ditanya mengenai pemilihan nama bimbel yang cenderung mengindikasikan adanya afiliasi dengan Universitas Indonesia, sebuah tawa terlepas dari Wicaksono seraya mengoreksi asumsi tersebut. “Pertama, dengan kata ‘pejuang’ kita merespon antusiasme adik-adik dari luar Jawa yang mau berjuang untuk mendapatkan kampus impiannya. Kedua, kata ‘UI’ disini bukan mengkonotasikan salah satu nama kampus PTN ya, tetapi di sini memiliki arti ‘Unggul dan Inspiratif’, lagi-lagi melambangkan semangat unggul adik-adik yang ingin berjuang dan harapan kami untuk menjadi inspirasi mereka untuk berhasil masuk PTN,” tegasnya. Meski hal ini mengklarifikasi itikad baik penamaan Pejuang UI, masih banyak bimbel-bimbel lain yang menyematkan nama perguruan tinggi tanpa ada-

nya afiliasi resmi yang dapat menciptakan kerancuan jaminan bagi para siswa.

Terkait pemberian harga, Wicaksono menjelaskan bahwa harga sebenarnya merupakan suatu hal yang relatif, terlebih untuk bimbel dengan sistem karantina dengan akomodasi eksklusif. “Biaya yang kami tampilkan di situs adalah biaya selama mereka menjalani pendidikan bersama kami, ada orang tua murid yang menganggap murah dengan kualitas pelayanan yang didapatkan, ada juga yang tidak,” terang beliau.

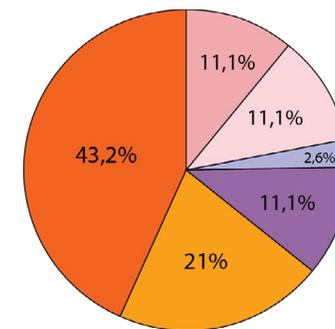


Diagram: Sebaran biaya bimbel responden*

Berkaitan dengan harga yang ditawarkan, ia juga turut menanggapi label komersialisasi pendidikan yang disematkan pada bimbel-bimbel eksklusif. “Nah, kalau dibilang komersialisasi, namanya bis-

nis orientasinya profit. Tapi pertanyaannya apakah kita hanya memikirkan profit, atau juga sekaligus menjaga kualitas? Nah, ini kembali lagi ke bimbel yang bersangkutan,” terangnya.

Investasi untuk Anak: “Kami sebagai orang tua juga gak punya pilihan”

Keputusan untuk memilih bimbel sebagai komplementer pendidikan formal tak lepas dari peran orang tua siswa. Tak hanya berperan sebagai penggelontor dana, orang tua juga berperan besar sebagai pendorong siswa mengikuti bimbel. Orang tua, baik secara tersirat maupun tidak, menyematkan ekspektasi tertentu terhadap pendidikan putra-putri mereka.

Salah satu orang tua pelajar, Nova (nama disamarkan) secara terang-terangan menjelaskan bahwa anggaran pendidikan yang rela dikeluarkannya untuk bimbingan belajar persiapan ujian masuk PTN merupakan sebuah bentuk investasi apabila digunakan secara tepat. “Saya rela mengeluarkan sekitar sepuluh sampai lima belas juta, sebab kalau anak saya berhasil diterima PTN, uang kuliahnya akan jauh lebih murah dibanding swasta,” ujar Nova.

Bahkan, menurutnya orang tua yang merogoh kocek lebih dalam hingga puluhan juta demi pendidikan bimbel sebenarnya dapat dirasionalisasi dengan logika yang sama. Untuk jurusan Ilmu Kedokteran misalnya,

*Data berasal dari survei Suara Mahasiswa UI

biaya bimbingan belajar puluhan juta demi mendapatkan kursi di salah satu PTN menjadi wajar mengingat biaya kuliah Kedokteran di perguruan tinggi swasta yang jauh lebih mahal hingga mencapai ratusan juta. Contoh ini menggambarkan bagaimana komersialisasi pendidikan tidak hanya ditemukan di bimbel saja, melainkan juga pada berbagai instansi pendidikan yang kemudian saling mempengaruhi secara kausal. Pendidikan tinggi sebagai upaya pencerdasan bangsa telah beralih fungsi menjadi komoditi yang berjalan dengan logika pasar. Sedikit kilas balik, wujud komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi semakin nampak ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) pada 2008. Singkatnya, melalui kebijakan ini, negara mengurangi subsidi terhadap perguruan tinggi, dan memberikan mereka otonomi untuk mencari dana secara mandiri. UI sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) tidak lepas dari kebijakan ini, implikasinya pun dapat dilihat pada beragam jalur masuk UI yang dipatok dengan UKT fantastis.

Terlepas dari beragamnya bentuk komersialisasi pendidikan, celah yang muncul dalam isu ini dapat dirunut akarnya dari: buruk dan timpangnya kualitas pendidikan Indonesia. Upaya mati-matian untuk mendapatkan pendidikan berkualitas merupakan indikasi pada dasarnya pendi-

dikan belum menjadi hak yang penuh, namun privilese yang hanya dimiliki orang-orang dengan kondisi tertentu.

Seperti yang diungkapkan oleh orang tua Nova yang sesungguhnya menyayangkan tendensi ketergantungan pelajar terhadap bimbel dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. "Kami sebagai orang tua juga gak punya pilihan ketika anak-anak bilang kalau soal-soal yang diujikan tidak diajarkan oleh sekolah, ya tentunya akhirnya harus memasukkan mereka ke bimbel," jelas Nova. Menurutnya, akan jauh lebih baik apabila terdapat pembenahan sistem penyeleksian soal ujian masuk perguruan tinggi agar lebih sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah atau sebaliknya dengan melakukan penyesuaian sistem pembelajaran sekolah agar lebih efisien dan akurat layaknya sistem belajar mengajar di kebanyakan bimbingan belajar.

Masa Depan Eksistensi Bimbel

Eksistensi bimbel—terlepas dari kontroversi atau permasalahannya, merupakan suatu hal yang wajar dan akan selalu dibutuhkan untuk menunjang para pelajar yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda antara satu sama lain. Fenomena komersialisasi pendidikan yang terjadi pun sebenarnya dapat dicegah dengan usaha bersama dari para pihak terkait. Pertama, perlu dilakukan pem-

benahan sistem pendidikan formal untuk mencegah terjadinya ketergantungan pelajar terhadap layanan bimbingan belajar. Kedua, lembaga bimbingan belajar juga harus melakukan introspeksi terhadap etik model bisnis mereka dengan turut berfokus memperbaiki kualitas pendidikan yang baik sesuai dengan biaya yang mereka tawarkan. Bagaimanapun, pendidikan idealnya bukanlah sebuah komoditas, melainkan hak. Ketiga, adanya kesadaran dari para orang tua dan pelajar untuk mengatur rencana pendidikan secara hati-hati dan wajar agar tidak terjerumus janji manis bimbingan belajar yang hanya memikirkan keuntungan semata.***



Ada Joki di Balik Tugas: Jalan Pintas Selesaikan Tugas di Kampus Kuning

Ditulis oleh: M. Qhisyam, Aisha Afdanty Ferkin

Bagi kalangan pelajar dan akademisi, beban berat tugas kuliah barangkali bukan rahasia umum lagi. Di Indonesia, penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi cukup memiliki perbedaan yang signifikan dengan kegiatan akademik pada jenjang-jenjang pendidikan di bawahnya. Selain bentuk dan isi tugas, salah satu perbedaan yang mencolok, yang menjadikan tugas-tugas kuliah harus disertai usaha dan tanggung jawab yang lebih besar adalah keterikatannya pada metodologi-metodologi

dan kode etik yang harus dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, tugas-tugas yang tidak sesuai dengan standar metodologi akademik tidak akan diterima oleh dosen atau tenaga pengajar di perguruan tinggi.

Selain itu, terdapat sejumlah tugas yang dibebankan kepada mahasiswa diberikan dalam tenggat waktu yang terbatas dan berbarengan dengan tugas dan kegiatan non-akademik lainnya. Oleh karena itu, pengerjaan tugas-tugas kuliah memerlukan tingkat disiplin yang tinggi ser-

ta rasa tanggung jawab yang besar. Seorang mahasiswa yang tidak siap dengan konsekuensi tersebut seringkali mencari solusi instan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu menyewa jasa joki tugas perkuliahan. Tentunya, bisnis gelap dunia perkuliahan ini tidak hanya laris karena beratnya beban tugas, tetapi juga karena perilaku malas, kurangnya kemampuan mengatur waktu dengan baik, hingga fakta bahwa sejumlah mahasiswa tidak memahami dan mengikuti dengan baik perkuliahannya.

Noda Hitam dalam Dunia Akademik: Lumrahnya Penggunaan Joki



Diagram: Pengguna jasa joki*

Meski ironis, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan jasa joki tugas sendiri dapat dikatakan sudah cukup lumrah di dunia akademik di Indonesia. Sebagai salah satu indikatornya, sebuah akun media sosial yang memasarkan jasa joki tugas di Instagram, @kerjainplis, diikuti oleh 267 ribu orang. Meskipun tidak merepresentasikan pengguna jasanya, tingginya jumlah pengikut akun-akun tersebut menggambarkan adanya pasar yang cukup luas dari bisnis gelap dunia akademis ini. Racun pada moral akademis ini menjangkiti hampir seluruh kalangan di perguruan tinggi, mulai dari mahasiswa hingga dosen, perguruan tinggi negeri atau swasta, perguruan tinggi yang kurang populer hingga yang ternama sekalipun menjadi pasar dari bisnis ini. Salah satunya di Universitas Indonesia.

Kendati menyandang titel sebagai World Class University dengan rentetan prestasi dan menjunjung nilai-nilai

moral akademis yang tinggi dalam Sembilan Nilai UI, sayangnya bisnis gelap ini juga dapat dengan lincahnya berselancar di kalangan mahasiswa UI. Terlebih di tengah pandemi, berbagai riset mengatakan bahwa penggunaan jasa joki tugas meningkat di masa pembelajaran jarak jauh (PJJ). Alasannya beragam, mulai dari dosen memberikan lebih banyak tugas di masa PJJ, pembelajaran online tidak seefektif tatap muka, penjelasan dosen terbatas, hingga budaya hustle culture di masa pandemi.

Terutama, di zaman digital tak sulit untuk mendapatkan jasa joki. Jika dulu jasa joki hanya dipromosikan dari mulut ke mulut, saat ini dengan sekali searching di internet, dalam sekejap ratusan akun yang menawarkan jasa semacam ini dapat dijangkau dengan mudahnya. Berdasarkan penelusuran Suara Mahasiswa UI di media sosial, jasa yang ditawarkan akun-akun joki tugas sangat beragam, mulai dari materi presentasi, makalah, edit video dan poster, proposal penelitian, bahkan skripsi. Ibarat kata—tinggal transaksi, beres. Seusai mencapai kesepakatan dan melakukan transaksi, mahasiswa bisa ajojing menikmati “Jumat ceria” atau “netflix and chill” tanpa perlu terbebani tugas.

Suara Mahasiswa UI telah melakukan survei mengenai penggunaan jasa joki di kalangan mahasiswa UI dengan total 114 responden. Berdasarkan hasil survei tersebut,

sebanyak 24,6% responden menyatakan pernah menggunakan jasa joki tugas dengan pengguna jasa joki tertinggi berasal dari mahasiswa angkatan 2020, yakni sebanyak 43% dan angkatan 2021 sebanyak 41.2%. Padahal, biaya yang dipatok untuk jasa joki ini dapat dikatakan tidaklah sedikit. Para pengguna joki rela mengeluarkan uang sebesar Rp50.000 bahkan lebih dari Rp300.000.

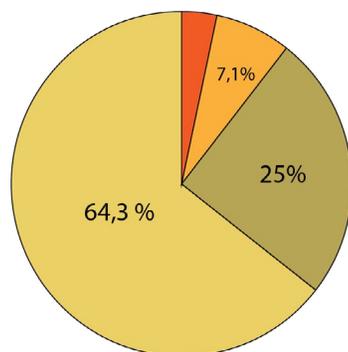


Diagram: Jenis-jenis jasa joki yang dipakai responden*

Ragam Alasan Memilih Jalan Tikus: Digempur Deadline hingga Bentrok dengan Kerjaan Lain

Mirna (nama disamarkan), salah satu mahasiswa UI, menuturkan pengalamannya selama menjadi pengguna jasa joki yang ia temukan

dari Instagram. Berdasarkan hasil survei, motivasi utama penggunaan joki adalah karena tugas yang menumpuk dalam waktu yang singkat, ditambah tuntutan untuk mempertahankan indeks kumulatif akademik (IPK). Dalam keterangannya, Mirna mengaku menggunakan jasa joki di saat ada tugas yang “bentrok” dengan tugas lain yang lebih menjadi prioritasnya. Kendala lain yang dialami Mirna adalah kondisi tubuh yang tidak menentu yang juga mendorongnya menggunakan joki sebagai solusi atas tumpukan tugasnya. Kendati hadirnya jasa joki ini memberikan la kemudahan dalam menyelesaikan tugas, namun Mirna mengaku sering merasa tidak puas dengan tugas hasil joki yang tak jarang dikerjakan dengan kualitas “asal jadi”.

“Enggak puas sama hasilnya, amit-amit, kesal banget kalau diingat lagi. Emang (menggunakan joki) bukan buat ngejar nilai ya, jelas karena namanya juga joki, cuma untuk tugas-tugas yang sekiranya butuh pengerjaan yang lama dan waktunya bentrok dengan tugas lain yang lebih jadi prioritas gue,” ujar Mirna.

Kendati jelas pelanggaran, namun tidak jarang mahasiswa memaklumi penggunaannya karena sejumlah kondisi tertentu. Misalnya menurut Mirna, baik buruknya penggunaan joki dapat dinilai dari situasi dan niat individu yang menggunakannya.

“Penggunaan jasa joki ini kompleks, terkait sama individu penggunaannya sendiri. Ada

individu yang aslinya memang paham materi, tetapi kepepet deadline atau ada urusan kerjaan lain jadi terpaksa pakai joki. Ada juga yang memang nggak niat kuliah dan pakai jasa joki buat penunjang nilai,” ujar Mirna.

Selain Mirna, beberapa responden survei yang juga merupakan mahasiswa UI menyebutkan sejumlah alasan mereka memakai jasa joki, beberapa diantaranya yaitu, “Tugas menumpuk dan keteteran”; “Menyelesaikan masalah dengan cepat”; “Hasil yang diberikan sangat memuaskan, responnya cepat”; “Bisa dapat nilai bagus”; “Data yg dikelola sendiri tidak valid sedangkan joki bisa dijadikan valid dengan mengganti beberapa angka dari hasil kuesioner”. Adapun jenis tugas yang paling sering ‘di-joki’ adalah tugas esai dengan persentase 64,3% dan diikuti oleh joki UTS/UAS dengan persentase 25%. Hal ini tidak begitu mengherankan, mengingat jika mahasiswa menginginkan nilai yang bagus, pengerjaan esai atau makalah memang membutuhkan waktu riset yang cukup, begitu pula dengan waktu pengerjaan tulisannya. Berbeda dengan soal pilihan ganda yang dapat dikerjakan dengan waktu yang cukup singkat, barangkali jika tidak mau pusing bisa pilih secara acak.

Berawal dari Rasa Iba, Berujung Mencari Laba

Berdasarkan hasil survei; penyedia jasa joki yang digunakan responden paling ba-

nyak dari penyedia jasa joki profesional dengan persentase 53,6%; diikuti teman atau mahasiswa UI dengan persentase 35,7%; dan teman atau mahasiswa dari luar kampus UI dengan persentase 21,4%.

Perspektif lain hadir dari Big Z (nama disamarkan), salah satu penyedia jasa joki di kalangan mahasiswa UI. Big Z, mahasiswa UI yang telah berkecimpung dalam bidang ini sejak masih semester dua. Ia mengatakan bahwa banyak dari pengguna jasanya terpaksa menyewa penjoki karena kepepet atau urusan mendadak. Meskipun begitu, tetap saja, bagi Big Z, menggunakan jasa joki bisa dibilang sangat merugikan bagi customer, khususnya secara finansial, mengingat tugas-tugas yang biasa ia kerjakan sebenarnya terbilang cukup mudah untuk dikerjakan sendiri oleh customer-nya.

Tugas-tugas yang biasa Big Z kerjakan kurang lebih persis seperti tugas-tugas yang ditawarkan penyedia jasa joki di media sosial—makalah, proposal research, transkrip wawancara, hingga infografis, tergantung pada permintaan dari customer.

“Sebenarnya tergantung gua disuruhnya apa sih. Kan gua ngelihat dulu tugasnya kayak apa, kalau masih batasan gua, ya udah gua iya-in” tutur Big Z.

Menarik linimasa ke belakang, pada awalnya Big Z menjadi penjoki karena merasa iba dengan salah satu kawannya yang kesulitan dalam mengerjakan tugas per-

*Data berasal dari survei Suara Mahasiswa UI

kuliahannya. Namun, setelah mengerjakan tugas pertamanya tersebut, motivasi utama yang membuatnya memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai penjoki tugas tak lebih dari godaan penghasilan yang menggiurkan. Ia mengaku bisa mendapatkan uang panas Rp100.000 hingga Rp300.000 untuk satu tugas yang ia kerjakan. Di musim-musim tertentu, seperti ketika UTS atau UAS, ia bahkan bisa mengantongi hingga empat juta rupiah dari hasil 'menjoki' tugas teman-temannya.

Seiring meningkatnya permintaan, Big Z mengajak teman-temannya yang tertarik menjadi 'tukang joki tugas' masuk ke dalam bisnis gelapnya. "Jadi kita tuh kayak firma gitu," ucap Big Z. Ketika ada permintaan masuk, Big Z bisa berunding dengan kawan setimnya di grup chat yang telah ia buat bersama kawan-kawan sesama penjokinya untuk menentukan siapa yang sanggup untuk mengerjakan tugas yang diminta customer-nya. Kemudian, tugas tersebut pun akan didelegasikan kepada orang yang berkenan mengerjakannya. Ia juga menambahkan, apabila kebetulan permintaan tugas yang masuk berasal dari program studi yang sama dengan salah satu program studi penjoki,

maka tugas tersebut otomatis dilimpahkan kepada penjoki tersebut.

Terkikisnya Nilai "Probitas", Adakah Cara Menghentikannya?

Di balik larisnya perjokian, terdapat moralitas akademik yang dikorbankan. Kendati demikian, hukum tidak terlalu dapat dilibatkan. Dilansir dari Kumparan, seorang pakar hukum, Laina Rafianti mengatakan bahwa jika dilihat dari perspektif hukum hak cipta, fenomena joki tugas pada dasarnya sudah melanggar hak moral. Hak moral artinya tetap mencantumkan nama, ciptaan, dan tidak dimutilasi.

"Kalau pelanggaran di hak cipta harus ada delik aduan, tapi di sini ada kesepakatan antara yang dijokiiin dan yang ngejokiiin. Biasanya kalau delik aduan yang terjadi adalah pemegang hak cipta merasa keberatan, sekarang yang mau mengadu siapa? Kembali ke kesadaran masing-masing kepada tata tertib dan etika akademik."

Dalam dunia akademik, hal ini tentunya tidak menguntungkan baik bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa, karena terlepas dari hak cipta, keduanya sama-sama melanggar kode etik dan dapat dikenai sanksi administra-

si atau sanksi akademik seperti skorsing. Sistem perkuliahan daring di perguruan tinggi Indonesia pun tak dilengkapi dengan instrumen kontrol terhadap integritas mahasiswa yang dapat mendeteksi "potensi-potensi penggunaan joki". Di University of People (UoP) di California, misalnya, menggunakan kriteria kinerja keaktifan mahasiswa sebagai dasar penilaian. Sementara itu, Australia telah menyusun undang-undang untuk meng kriminalisasi praktik perjokian, dengan vonis sampai 2 tahun penjara untuk terpidana joki. Hal ini cukup progresif, mengingat jasa joki dapat merusak pola pikir akademis, kapasitas serta mentalitas sivitas akademika. Sudah seharusnya, sejumlah akademisi meletakkan perhatian yang cukup serius terhadap permasalahan ini. Khususnya di UI, penggunaan dan penyedia jasa joki di UI, jelas telah mengingkari salah satu prinsip dan nilai UI yang sangat penting yaitu, probitas yang berarti kejujuran.

Referensi:
ABC Australia. (2019). Australia Ancam Penjarakan Para Penyedia Jasa Joki di Kampus.

FREE RIDER

BY: ZAHFA RAHMA A.



Totto Chan: Gadis Cilik di Jendela, Refleksi Nilai Humanisme di Tengah Himpitan Pendidikan Konvensional

Teks oleh: Muhammad Rafli Gebrena



Judul Buku: Totto Chan: Gadis Cilik di Jendela (Madogiwa no Totto-chan)

Pengarang: Tetsuko Kuroyanagi

Jumlah Halaman: 272 halaman

Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit: 2007

Sudah empat dekade, Tetsuko Kuroyanagi, seorang aktris, penulis, dan duta persahabatan untuk UNICEF asal Jepang menerbitkan sebuah novel yang menghadirkan kisah nyata Tetsuko Kuroyanagi tentang memori kehidupan masa kecilnya saat belajar di sebuah sekolah yang memiliki pendekatan humanis dalam setiap pembelajarannya.

Kenangan itu bermula dari Totto Chan (Tetsuko Kuroyanagi), seorang gadis cilik yang terpaksa dikeluarkan dari sekolah dasarnya karena dianggap berperilaku aneh oleh gurunya, padahal segala tingkahnya dilakukan atas dasar keingintahuannya yang besar. Oleh karena itu, Mama Totto Chan mendaftarkannya ke sekolah baru, yaitu

Tomoe Gakuen yang memiliki nuansa yang sangat berbeda dengan sekolah dasar pada umumnya di Jepang mulai dari bentuk bangunan sekolah unik yang menggunakan gerbong kereta yang tidak terpakai sebagai kelas hingga metode pendidikan yang tidak lazim digunakan saat itu.

Totto Chan sangat senang dengan sekolah baru yang se-

lalu memberikan hal yang tidak pernah diduganya. Sosaku Kobayashi, kepala sekolah sekaligus pendiri Tomoe Gakuen selalu menerapkan metode belajar yang menyenangkan bagi anak seusia Totto Chan, seperti kegiatan bekal makan siang dengan membawa “sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan”, pelajaran musik dan euritmik, kegiatan

belajar di alam, hingga kegiatan belajar bebas dan mandiri yang dilakukan sesuai dengan keinginan masing-masing murid. Hal itu yang membedakan Tomoe Gakuen dengan sekolah dasar pada umumnya yang selalu terikat dengan peraturan, kurikulum, dan jadwal sekolah yang terkadang kaku dan membosankan.

Sosaku Kobayashi merupakan sosok “ayah” yang selalu memahami kondisi setiap muridnya dengan selalu menanamkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab, Sosaku Kobayashi juga selalu melontarkan kata yang mungkin terdengar sepele seperti “Kau benar-benar anak yang baik, kau tahu itu kan?” dan “Kau bisa melakukannya”, tetapi kata-kata itulah yang diingat dan terus menyemangati Totto Chan dan anak lainnya untuk tetap percaya diri, bahkan menjadi faktor pembentuk arah kehidupan yang lebih baik bagi murid-murid Tomoe Gakuen.

Novel ini memiliki plot datar dengan beberapa kata atau dialog repetitif yang mungkin akan membuat pembaca sedikit bosan. Namun, novel ini berhasil mengangkat isu pendidikan yang masih sesuai dengan realitas pendidikan saat ini. Penggambaran metode pendidikan humanis

yang menekankan pada kebebasan dan kemandirian setiap murid untuk bisa berekreasi dan berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya menjadi kritikan keras bagi sistem pendidikan konvensional yang cenderung melakukan generalisasi pada model pembelajaran dan standar etika pada setiap murid yang mempunyai minat, bakat, dan karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Selain itu, novel ini juga berhasil mengenalkan metode pembelajaran yang humanis dimana pendidik berperan sebagai motivator, pengarah, serta role model bagi setiap murid yang membantu proses pembentukan jati diri dengan bahasa yang sederhana. Totto Chan: Gadis Cilik di Jendela menjadi buku yang dapat membuat pembaca mengingat kembali momen-momen masa kecil saat bersekolah dengan keluguan dan kebebasan yang dimiliki seorang anak dalam mencari jati dirinya. Maka, tidak mengherankan novel ini menjadi buku terlaris dalam sejarah penerbitan Jepang dan digunakan sebagai buku pembelajaran wajib di Jepang.

Totto Chan: Gadis Cilik direkomendasikan bagi yang tertarik dengan dunia pendidikan. Kesan kuat dari Sosaku

Kobayashi sebagai pendidik dapat menginspirasi kita untuk “memanusiakan manusia” dimana setiap anak memiliki fisik, karakter, minat, dan bakat yang berbeda yang tidak bisa dipaksakan dan disamakan seperti pendidikan konvensional, terkadang anak harus diberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi secara mandiri sehingga terbentuk kepribadian anak yang autentik.

“But there’s no doubt that children have an innate sense of humor. No matter how young they are, they always know when something’s really funny.”

Kisah Mereka: Perjalanan Menentang Stigma

Ditulis oleh: Loga Prity
Dewi, Dyaning Pramesti
Putri

Keterbatasan fisik kerap kali dianggap menjadi suatu tabir dalam berkarya. Namun, semua orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam menimba ilmu dan memperjuangkan mimpi. Disabilitas bukan berarti batas.

Diitemui melalui ruang Zoom kala itu, Raditya Arief Putrasetiawan atau Radit, bercerita panjang-lebar mengenai perjalanan hidup dan mimpi-mimpinya. Seperti kebanyakan orang pada umumnya, Radit hidup dengan segenggam cita-cita; cita-cita yang dilandasi oleh ketertarikan intelektualnya terhadap isu-isu Timur Tengah, yang kini telah membawanya duduk di prodi Sastra Arab UI. Satu hal yang membedakannya dari kebanyakan orang adalah, ia “melihat” cita-citanya dengan cara yang berbeda—Radit terlahir sebagai seorang tunanetra.

Radit adalah salah satu dari penyandang disabilitas yang ber-

untung, karena hingga saat ini data BPS menunjukkan penyandang disabilitas belum mencapai kesetaraan dengan rekan-rekan mereka dalam jenjang pendidikan. Nyatanya, hanya sekitar 2,8% penyandang disabilitas Indonesia berusia di atas 15 tahun yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kendati peraturan

mewajibkan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi dari 4.504 perguruan tinggi di Indonesia, baru 74 perguruan tinggi yang menerima mahasiswa disabilitas.

Kendati begitu, Radit memilih untuk percaya bahwa kondisi fisik yang ia miliki tidak lantas sama dengan “keterbatasan ambisi”. Perjuangan luar biasa ia tempuh untuk mendobrak batas-batas yang disematkan oleh masyarakat terhadapnya. Terlepas dari itu semua, tak jarang bagi Radit mendapatkan pandangan dan perlakuan yang kurang baik dari lingkungan sekitar.

“**Karena ketidaktahuan, mereka memandang bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak bisa apa-apa dan memperlakukan saya seperti anak kecil. Misal, ketika saya sedang jalan dengan teman atau keluarga, mereka menganggap bahwa ini merupakan sesuatu yang abnormal. Padahal orang yang menyandang disabilitas itu sama dengan mereka,**

la bercerita bahwa pandangan sebelah mata yang ia dan lainnya terima cenderung membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Akibat rendahnya akses pendidikan, sebagian besar penyandang disabilitas terlibat dalam perekonomian informal. Data Kemnaker tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya

sekitar 1% penyandang disabilitas yang memiliki karir formal dalam sektor industri.

“Akibatnya perusahaan jadi takut untuk merekrut pegawai disabilitas. Saya cukup sedih melihatnya. Saya berharap kedepannya lebih banyak sosialisasi terhadap penyandang disabilitas sehingga masyarakat bisa memandang kaum disabilitas itu bukan suatu kekurangan, tetapi suatu perbedaan,” ujar Radit.

Secara demografis, jumlah difabel terus mengalami peningkatan, tetapi kondisi tersebut tidak diiringi dengan peningkatan sistem pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar difabel. Meskipun demikian, dalam proses kesehariannya, Radit telah belajar untuk mengatasi rasa sedih yang ia rasakan. Alih-alih merutuk keadaan, Radit memilih untuk memberikan “pembuktian” yang manis. “Cara *overcome* dari perasaan sedih itu, saya harus membuktikan, dengan cara meraih prestasi, menyelesaikan pendidikan saya, dan setelah saya kembali ke masyarakat, saya dapat membuktikan pada mere-

ka bahwa disabilitas itu bukan kekurangan,” tegasnya, dengan binar ambisinya.

Pemenuhan Hak Difabel UI: Fasilitas Masih Terbatas

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Kemahasiswaan UI dan Klinik Satelit Makara UI diketahui terdapat 132 mahasiswa difabel per tahun 2019.

hasiswa disabilitas di UI yang masih belum berjalan dengan baik. Radit mengemukakan bahwa hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada tenaga pendidik serta kurangnya koordinasi dari fakultas dan jurusan.

“(Hal ini—red) kadang menyulitkan saya untuk menjelaskan mengenai keadaan

kesulitan ketika menyampaikan kondisinya guna pihak jurusan memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya ia butuhkan. “Jadi saya harus memikirkan kira-kira penjelasannya itu harus benar-benar detail dan harus saya jelaskan benar-benar secara penuh apa yang saya butuhkan,” tambahnya.



UI sebagai perguruan tinggi yang tergabung dalam KOPERTINA (Konsorsium Perguruan Tinggi Inklusif Indonesia) telah membentuk unit layanan mahasiswa difabel sejak tahun 2018 secara ad hoc dengan tujuan utama memberikan pelayanan kepada mahasiswa difabel sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mahasiswa dapat belajar, berprestasi dan mengembangkan kompetensinya secara maksimal.

Kendala perkuliahan ini dialami Radit saat menjalani perkuliahan. Ia seringkali menemukan beberapa pelayanan khusus ma-

saya terutama bagi beberapa tenaga pendidik yang belum paham, khususnya di hari pertama kuliah.”

Pelayanan khusus ini biasanya terjadi saat pembelajaran berlangsung. Sebagai mahasiswa Sastra Arab yang tak jauh-jauh dari pelafalan bahasa, Radit selalu meminta untuk

diberitahukan terlebih dahulu apabila terdapat kegiatan atau tugas untuk membaca di dalam kelas, supaya ia dapat mempersiapkan diri dan membaca dengan baik. Namun, Radit sering menemui

Komunitas dan Pandangan Baru

Meski menghadapi tekanan dan tantangan, Radit terus mengembangkan dirinya. Salah satunya dengan bergabung dalam komunitas yang bergerak di bidang pengembangan anak muda dalam membangun usaha baru

dan mencari pekerjaan. Komunitas ini menjadi wadah bagi Radit untuk mengembangkan diri dan membantu orang lain. “Saya tertarik karena saya ingin menambah teman-teman baru, relasi baru, koneksi baru. De-

ngan saya bergabung komunitas, saya mendapatkan manfaat dari program-program yang dilaksanakan sehingga bisa diterapkan nanti ketika saya mau membangun usaha atau mencari pekerjaan,” terang Radit.

Radit juga menemukan wadah untuk mengembangkan *soft skill* dan meningkatkan kemampuannya dalam kerja sama tim. Ia juga bisa berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang dan sifat yang berbeda. Komunitas ini juga menjadi tempat pertemuan antara Radit dengan teman-teman disabilitas lain. Darinya, Radit mendapatkan perspektif baru akan dunia kerja dan tekanan yang dihadapi.

“Saya bertemu mahasiswa disabilitas lain, tapi bukan mahasiswa sih dia udah lulus, sudah bekerja dan dia guru. Saya juga bisa mendapatkan perspektif baru dari seorang yang sudah bekerja. Kalau udah kerja bagaimana cara dia menghadapi tekanan, karena dunia pendidikan dan dunia kerja pasti berbeda,” tutur Radit.

Bereksplorasi Melalui Tulisan

Selain berorganisasi, tulisan juga menjadi wadah bagi Radit untuk belajar dan bereksplorasi. Dimulai dengan cerita fiksi, kegemarannya menulis ia kembangkan Januari lalu dengan mencoba menulis konten. Berawal dari rasa keingintahuannya terhadap karya apa saja yang bisa dihasilkan seorang penulis, Radit men-

coba belajar menulis artikel yang berhasil diterbitkan ke media.

“Sebelumnya saya mencari tahu karya-karya apa yang bisa dibuat oleh seorang penulis, nah salah satunya adalah nulis konten. Saya coba gitu, gimana caranya nulis konten dengan mencoba menulis artikel dan dikirim ke media dan ternyata terbit.”

Ketika menulis, tidak jarang Radit perlu melakukan riset terlebih dahulu. Proses ini yang kemudian membuatnya belajar hal-hal baru seperti konsep, teori, hingga pandangan baru. Baginya, menulis meluaskan wawasannya. “Saya melihat dengan menulis wawasan saya semakin luas,” terang Radit.

Menulis merupakan proses yang bermakna bagi Radit. Baginya, menulis puisi seringkali terasa seperti menyembuhkan, menulis cerpen membuatnya merasa sedang berinteraksi dengan sesuatu, sementara menulis artikel menjadi kesempatannya untuk belajar banyak hal baru. Tulisan menjadi cara baginya memproyeksikan apa yang ada dipikirkannya.

Ketertarikannya ini juga mendorongnya untuk bergabung dengan komunitas kepenulisan. Bersama anggota komunitas, Radit pernah menulis antologi yang kemudian dipublikasikan. Dalam menulis fiksi, kesedihan dan kerinduan menjadi tema kesukaannya ketika menulis cerita. “Saya senang aja menulisnya (kerindu-

an), saya juga senang menulis yang sedih-sedih, merangkai katanya jauh lebih menyenangkan,” ujar Radit.

Radit akan terus menulis. Ia menuturkan ketika ada waktu senggang dia akan mencoba menulis di Wattpad, platform menulis, dan mengirimkan artikel ke media. Ia juga akan terus bereksplorasi, baik dibidang menulis atau bidang lainnya. Menurut Radit, eksplorasi membantunya menentukan bidang apa yang akan ia tekuni di masa depan. “Saya tuh pribadi yang menentukan pilihan setelah saya mengeksplor dulu. Jadi saya akan tahu setelah mengeksplor dan menemukan bidang yang sesuai,” tutup Radit.

Seperti kita, difabel memiliki mimpi dan berusaha sekuat tenaga juga untuk memperjuangkan mimpinya. Sudah selayaknya, institusi pendidikan atau sekolah memfasilitasi dan membantu usaha-usahanya di dunia akademik. UI masih memiliki tumpukan PR untuk memberikan akomodasi bagi penyandang disabilitas baik dalam kelas maupun seleksi tes masuk, mengingat rasio mahasiswa difabel di UI masih terbilang sangat kecil. Tanpa usaha yang signifikan dan terencana dengan baik, persentase partisipasi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi akan terus rendah.

REVISI STATUTA UI, SURAMNYA MASA DEPAN KAMPUS KUNING



Ditulis oleh:

- Dian Amalia Ariani
- Farrell Charlton Firmansyah
- Syifa Nadia Rahmawati

Ilustrasi: Shafira Sarah Saffa



Otokrasi dalam Statuta UI, Sehatkah Tata Kelola Universitas Kita?

S etahun berlalu usai polemik disahkannya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (“Statuta UI”). Hingga saat ini, publik belum mendengar kabar terbaru usai mengundang gaduh kritik dari berbagai kalangan. Saat angin permasalahan internal UI tersebar ke khalayak luas, kala itu yang banyak disoroti publik hanyalah persoalan rangkap jabatan Ari Kuncoro, yang kemudian berujung pada pengunduran dirinya sebagai Wakil Komisaris BRI. Namun, pihak-pihak internal UI, khususnya yang terlibat, tentu tahu bahwa permasalahan revisi statuta UI lebih dari sekedar polemik rangkap jabatan, terdapat permasalahan besar tentang tata kelola universitas atau *good university governance* (GUG) yang terguncang keras akibat kecacatan peraturan tersebut.

Peraturan tersebut dinilai cacat, baik secara formil maupun materiil. Dalam proses ‘ketok palu’-nya, revisi Statuta UI yang disahkan pada pertengahan tahun lalu nyatanya tidak melibatkan Dewan Guru Besar (DGB) dan Senat Akademik (SA) sebagai pihak yang perumus awal naskah Statuta UI. Terlebih, mahasiswa sebagai salah satu stakeholder terbesar di universitas juga tidak dilibatkan dalam tim terbaru revisi Statuta UI.

“Secara formil dibuatnya tidak berdasarkan kesepakatan bersama, jadi draf yang disepakati bersama itu tidak digunakan, mereka ubah-ubah lagi lalu itulah yang ditandatangani jadi Statuta. Itu yang dikatakan tidak transparan, tidak jujur dan lain-lain,” terang Profesor Sulistyowati saat dikonfirmasi Suara Mahasiswa UI.

Selain itu, secara materiil peraturan tersebut juga diprotes ke-

ras akibat sederet permasalahan, mulai dari tata kelola universitas yang timpang hingga celah politisasi kampus yang berpotensi mengganggu independensi UI sebagai institusi pendidikan. Adapun dari perspektif mahasiswa, terdapat pula sejumlah substansi yang berisiko merugikan, misalnya keputusan absolut rektor dalam menentukan biaya pendidikan hingga pengurangan kewajiban UI dalam mengalokasikan dana bantuan mahasiswa yang kurang mampu.

“Perubahan pasal yang semula mewajibkan UI untuk menajaring dari seluruh maba jenjang Sarjana, lalu diubah menjadi bagi hanya maba yang diterima melalui pola penerimaan nasional. Bahkan, penghapusan ayat (5) juga jelas menghilangkan kewajiban UI untuk mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi, ini kan ngga sesuai

sama amanat dikti,” terang Andri selaku Kepala Departemen Kajian Aksi Strategis BEM UI 2022.

Kemudian, bagian paling krusial dari permasalahan statuta adalah tentang tata kelola universitas. Tidak hanya pada satu pasal, sejumlah pasal kompak memperpendek birokrasi dan menyerahkan keputusan secara hampir absolut kepada rektor. Debirokratisasi ini memotong metode-metode transparansi *check and balances* atau mekanisme saling memantau dan mengawasi secara kolegialitas antar organ pemangku kebijakan di UI.

“Seperti kalian belajar tentang teori negara, itu (rektor-read) harus ada organ-organ lain yang menjadi *balancing power* untuk *check and recheck* ketika membuat perencanaan akademik, perencanaan tata kelola, melakukan monitoring evaluasi, semuanya harus ada *check and balances*, nah itu tampaknya tidak terlalu jalan di Statuta UI,” sambung Sulistyowati atau yang akrab disapa Prof. Sulis.

Beberapa aturan yang awalnya merupakan kewenangan bersama Majelis Wali Amanat (MWA) kemudian dipangkas memusat pada kewenangan rektor seorang, antara lain: (1) Pengangkatan/pemberhentian jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, lektor kepala, dan guru besar (pasal 41 ayat 4 dan 5); (2) Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru, biaya pendidikan pasca sarjana, pendidikan profesi, dan vokasi (pasal 13 ayat 9); (3) Ketentuan sidang terbuka UI dalam rangka wisuda, dies natalis, dan pengangkatan doktor kehormatan (pasal 14 ayat 3); (4) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan UI (pasal 77 ayat 1); (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan (hono-

ris causa); (6) Kewenangan mengenai pengabdian masyarakat (pasal 20 ayat 5); (7) Sanksi terhadap penyelenggaraan kegiatan non-akademik; (8) Pasal rangkap jabatan BUMN (Pasal 39 C).

Ujung dari keroposnya mekanisme *check and balances* adalah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan malpraktik seperti korupsi, karena ketimpangan kuasa dan pembuatan aturan berdasarkan subjektivitas rektor. Sentralitas kekuasaan rektor pada statuta baru ini hampir absolut sebab ia tidak perlu menyusun Anggaran Rumah Tangga (ART) di UI. Dengan revisi terbaru, ia memiliki kuasa untuk mengatur berbagai hal melalui Peraturan/Keputusan Rektor. Implikasi dari hal ini adalah risiko menurunnya iklim demokratis dalam kampus.

Selain mengikis demokrasi, rawan politisasi juga menambah panjang deretan masalah statuta terbaru UI. Indikasi kerentanan politisasi tersebut terlihat dari perubahan pasal tentang rangkap jabatan (Pasal 39 C), penghilangan kriteria MWA tentang larangan keanggotaan partai politik (Pasal 27 ayat 3), penambahan anggota MWA unsur keanggotaan tanpa urgensi, tanpa kriteria yang jelas (Pasal 25), serta pasal karet tentang kriteria baru anggota MWA yakni mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan pemerintah, serta tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan UI. Serangkaian pasal ini membahayakan otonomi ilmiah kampus yang seharusnya dijauhkan dari kekuasaan politik dan uang.

Statuta merupakan pedoman dasar yang digunakan setiap perguruan tinggi sebagai acuan atau landasan dalam merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional perguruan tinggi. Sesuai aturan hukum naskah

pedoman dasar ini disepakati bersama oleh keempat organ UI, yaitu MWA, Rektor, Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB). Sayangnya, naskah Revisi Statuta UI yang diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Juli tahun lalu tidak mengikutsertakan SA dan DGB dalam perumusannya, sehingga berisiko memunculkan pasal-pasal selundupan yang tidak disepakati oleh keempat organ UI.

Satu Tahun Redup Redam, Bagaimana Kabar Statuta UI?

Berbagai pihak telah melakukan upaya-upaya sebagai bentuk protes terhadap Statuta UI. Pihak mahasiswa, salah satunya BEM UI, gencar mengirim rekomendasi kebijakan hingga kepada lima kementerian. Namun, hasilnya masih tak sesuai harapan—episode demi episode drama Statuta terus berlanjut lantaran kebalnya telinga rektorat terhadap aspirasi.

Dalam wawancara terbarunya dengan Suara Mahasiswa UI, Profesor Sulistyowati dari FH UI mengonfirmasi bahwa kendati belum rampung, upaya revisi telah dilakukan. Pembedahan dan pembenahan pasal per pasal dilakukan dan prosesnya memakan waktu bulanan dengan perdebatan yang seringkali macet. Dalam perdebatan tersebut, perwakilan rektorat seringkali berkilah bahwa revisi Statuta tidak diperlukan sebab sudah ada peraturan turunannya. Yang cukup mengherankan, peraturan-peraturan turunan tetap dibuat padahal Statuta, peraturan dasarnya sedang direvisi karena bermasalah.

“Ada organ-organ yang ngotot jangan diubah meskipun cacat di mana-mana, jangan diubah, gitu. Itu jadi menyebabkan kesulitan dari kelancaran revisi ini,” tutur Prof. Sulis.

Profil Kepengurusan MWA UI 2022

Ketua MWA UI



Saleh Husin , S.E., M.Si.,

Afiliasi politik:
Partai Hanura, menjabat
sebagai anggota DPR (2009-
2014)

Karir

1. Menteri Perindustrian Indonesia ke-24
2. Direktur Utama PT. Sapta Kencana Buana (1998-sekarang)
3. Komisaris Utama PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk

Sekretaris MWA UI



Dra. Corina D. S. Riantoputra,
M.Com., Ph.D.

Karir:

1. International Leadership Association
2. Asia Academy of Human Resource Management
3. Mantan Wakil Dekan Fakultas Psikologi (2014-2018)

Anggota MWA UI-Ex-Officio



Nadiem Anwar Makarim, B.A, M.B.A.

- Karir/organisasi:
1. CEO dan Founder, Gojek (2010 - 2019)
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2019 - sekarang)
 3. Anggota Ex-Officio MWA UI (2019 - sekarang)



Prof. Ari Kuncoro, S.E, MA, Ph.D.

- Karir/organisasi:
1. Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (2017 - 2020)
 2. Rektor Universitas Indonesia (2019 - sekarang)
 3. Wakil Komisaris Utama Bank Republik Indonesia (2020 - sekarang)
 4. Anggota Ex-Officio MWA UI (2019 - sekarang)

Anggota MWA UI Wakil Dosen



Prof. Bambang P. S. Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D.

- Afiliasi Politik: Independen
Karir/organisasi:
1. Menteri Ristek/Kepala BRIN (2021)
 2. Ketua Dewan Profesor FEB UI (2021-sekarang)
 3. Komisaris Utama PT Telkom (2021-sekarang)



Dr. drg. Yosi Kusuma Eriwati, M.Si.

- Karir:
1. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UI (2013-2017)
 2. Ketua IPAMAGI (2017-2021)



Dr. Sri Mulyani Indrawati

- Karir:
1. Direktur Pelaksana Bank Dunia (2010-2016)
 2. Menteri Keuangan ke-36 (2016-sekarang)
 3. Wakil Kepala Pertama BRIN (2021-sekarang)



Dr. Drs. Fredy Buhama Lumban Tobing, M.Si.

- Karir/organisasi:
1. Auditor Internal Academic Quality UPN "Veteran" Jakarta (2008 - sekarang)
 2. MWA UI - Wakil Dosen (2019 - sekarang)
 3. Dekan FISIP UPN "Veteran" Jakarta (2009 - sekarang)



Prof. drh. Wiku B. B. Adisasmito, M.Sc., PhD.

- Karir:
1. Ketua Tim Pakar dan Juru Bicara Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
 2. Mempraktisai dibentuknya Indonesia One Health University Network (INDOHUN)
 3. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (2020-sekarang)



Dr. Sri Mardiyati, M. Kom.

- Karir:
1. Anggota MWA UI - Wakil Dosen (2019 - sekarang)

Anggota MWA UI - Wakil Masyarakat



Drs. Hans Kartikahadi

- Karir:
1. Anggota Dewan Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk (2015-sekarang)



Jonathan Tahir

- Karir:
1. Chairman Forbes Indonesia (2010-sekarang)
 2. Komisaris Utama Sona Topas Tourism Industry (2010-sekarang)
 3. Komisaris Utama Arthamulia Indah (2012-sekarang)
 4. CEO Mayapada Group (2020-sekarang)



Dr. Darmin Nasution, S.E.

- Karir/organisasi:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (2015-2019)
 2. Anggota MWA UI - Wakil Masyarakat (2019 - sekarang)



Erick Thohir, B.A., M.B.A.

- Afiliasi Politik: Tim Kampanye Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Pemilu (2019)
Karir/organisasi:
1. Menteri Kementerian BUMN (2019-2024)
 2. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) (2021 - sekarang)
 3. Dewan Pengawas Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) (2021 - sekarang)
 4. MWA UI - Wakil Masyarakat (2019 - sekarang)



Dr. (HC) Noni Sri Ayati Purnomo B.Eng., MBA.

- Karir/organisasi:
1. Presiden Direktur / CEO, PT. Blue Bird (2019 - 2021)
 2. Presiden Komisaris, PT. Blue Bird (2021 - Sekarang)
 3. Anggota MWA UI - Wakil Masyarakat (2019 - sekarang)

Anggota MWA UI - Tenaga Kependidikan



Luluk Tri Wulandari, M. Hum

- Karir:
1. Anggota Tim Pakar e-resources Ristekdikti (2019)
 2. Anggota MWA UI - Wakil Tenaga Pendidik (2019 - sekarang)

Anggota MWA UI - Wakil Mahasiswa



Muhammad Taqiyuddin Abdurrosyid Zaidan

- Organisasi:
1. Staf Adkesma BEM FISIP UI (2019)
 2. Anggota MWA UI - Wakil Mahasiswa (2019 - sekarang)
 3. Wakil Ketua 2, DPM UI (2021)
 4. Awardee Rumah Kepemimpinan

Politisasi dalam Statuta UI, Sehatkah Tata Kelola Universitas Kita?

Dalam webinar bertajuk “Menilik Statuta UI yang Baru” yang diselenggarakan melalui *platform* Zoom pada Sabtu (24/07/21), Prof. Manneke Budiman, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI menegaskan bahwa keberadaan PP ini memuluskan jalan bagi rektor (atau siapapun yang kelak menjabat sebagai rektor) untuk memasukkan orang-orang politik ke UI, baik melalui jalur MWA maupun jalur akademik tanpa pertimbangan organ lain secara proporsional.

Pemilihan rektor yang mulanya dilakukan oleh MWA melalui panitia independen pun diganti dan diserahkan sepenuhnya kepada MWA. Di saat yang sama, Statuta UI hasil revisi ini juga turut menghapus syarat non-anggota partai politik untuk menjadi anggota MWA. Padahal, saat ini saja, sedikitnya tujuh dari 17 anggota MWA UI punya rekam jejak kedekatan dengan pemerintahan Jokowi meskipun tanpa latar belakang partai politik. Mereka adalah Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Erick Thohir (Menteri BUMN dan eks Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf), Darmin Nasution (eks Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Wiku Adisasmito (juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19), Bambang Brodjonegoro (eks Menristek dan Menteri Bappenas), Saleh Husin (Koordinator Tim Ahli Wapres RI), dan Jonathan Tahir (Penasihat Kepala Kantor Staf Presiden). Dapat ditambah pula dengan dibuatnya MWA UI Unsur Kehormatan yang belum jelas kriteria dan urgensinya, sehingga menambah besarnya celah kepentingan politik

untuk masuk ke dalam institusi pendidikan.

Ketika mahasiswa menuntut transparansi dari pihak MWA, upaya ini terbentur oleh betapa tertutupnya rapat-rapat MWA—*notulensi* dan rekamannya bahkan tidak bisa diakses oleh mahasiswa dengan dalih kode etik. Pun akses terhadap draf kebijakan serta naskah akademik pun tidak tersedia. Hal tersebut berpotensi meminimalisir monitoring dan partisipasi mahasiswa terhadap pengambilan kebijakan kampus yang berjalan di internal MWA. Meskipun telah ada perwakilan mahasiswa dalam MWA, tidak banyak informasi yang dapat diketahui—MWA UI UM hanya memberi tahu nama rancangan kebijakan yang dibahas tanpa gambaran yang lebih jelas mengenai muatan substansi dalam rencana-kebijakan tersebut.

Berbagai pertanyaan pun muncul: **apakah MWA disusupi oleh kepentingan yang “tak kasat mata”?** Tanda tanya ini utamanya dilandasi oleh kuatnya peran “orang-orang istana” yang berada di UI. Misalnya, kursi-kursi MWA diduduki oleh menteri-menteri dan orang-orang yang berada di pucuk pemerintahan. Berdasarkan penelusuran Suara Mahasiswa UI, masih tidak diketahui bagaimana proses pelantikan MWA dan apa saja kriteria yang benar dibutuhkan untuk menjabat di posisi tersebut.

Reni Suwarso selaku Dosen Ilmu Politik FISIP UI, mencurigai adanya kepentingan politik praktis yang menyusupi keberadaan proses penyusunan revisi Statuta UI. Ia menyebutkan bahwa PP

Nomor 75 Tahun 2021 ini “rasa parpol”, karena menurutnya ada dua pasal yang tidak seharusnya dimasukkan dalam Statuta UI baru, yaitu pada Pasal 25 Ayat (6) yang berbunyi: “Anggota MWA kehormatan merupakan tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap UI” serta pasal yang mengatur mengenai Unsur Masyarakat MWA UI pada Pasal 27 Ayat (3), yaitu “dapat menjaga hubungan baik dengan pemerintah”. Menurut Reni, hadirnya dua pasal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi partai tertentu.

Seberapa Jauh Potensi Dampak Statuta?

Pada 2020 lalu, BEM UI mengalami teror dan represi akibat menyelenggarakan webinar mengenai rasisme hukum di Papua. Webinar ini kemudian dianggap mendukung gagasan separatisme dan pelaksanaannya dinilai “menyalahi aturan”. Tak lama kemudian, UI “mencuci tangannya” dengan menyatakan bahwa UI tidak ada sangkut-pautnya dengan penyelenggaraan webinar tersebut melalui siaran pers. Dalam siaran pers yang sama, pihak rektorat menilai bahwa pembicara yang diundang dalam diskusi tersebut, yakni Veronika Koman, tidak layak.

Pada tahun yang sama, muncul kontroversi akibat adanya Pakta Integritas, yang wajib ditandatangani oleh mahasiswa baru dengan ancaman sanksi yang tidak main-main apabila dilanggar—sanksi terberat adalah *drop out*. Sorotan utama tertuju

pada dua butir poin dari total tiga belas poin yang ada, yakni poin 10 dan 11. Poin 10 berbunyi, “Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara.” Pasal 11 berbunyi, “Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi pimpinan fakultas dan/atau pimpinan UI.”

Tidak hanya bersifat satu arah, Pakta Integritas ini dinilai tidak masuk akal. Kedua poin tersebut dinilai bersifat karet dan dapat sewaktu-waktu digunakan untuk membatasi gerakan mahasiswa apabila “mengganggu tatanan akademik dan bernegara” yang tolak ukurnya tidak jelas. Fenomena ini dapat mengancam kebebasan akademik, berpikir, dan bergerak, yang dimiliki oleh mahasiswa—contoh dari bagaimana kebebasan akademik dijejat hingga pincang. Atas fenomena tersebut, netizen bahkan menemukan sebutan yang lucu untuk disandang oleh UI—yakni Universitas Istana.

Dampak lainnya terdapat pada perubahan Pasal 11 ayat (3) dan penghapusan Pasal 11 ayat (5). Konsekuensinya, UI hanya menjerang penerima beasiswa dari mahasiswa jalur penerimaan nasional. Selain merugikan mahasiswa, perubahan ini tidak sesuai dengan amanat UU Dikti. Menurut Andri, Kepala Departemen Aksi dan Strategis BEM UI, Statuta UI berpotensi pula membatasi aktivisme mahasiswa lantaran potensi intervensi kekuasaan yang tinggi. “Bahkan kami memandang lebih baik dicabut saja mengingat banyaknya cacat dan potensi kerugian yang

dihadirkan secara formil dan materiil. Perubahan Statuta UI menunjukkan krisis implementasi dari nilai-nilai UI,” ujar Andri menuturkan pandangannya.

Pemberian akses terhadap kepentingan politik di UI berpotensi akan mendatangkan konflik kepentingan yang dapat merobohkan iklim kebebasan akademik di UI. Salah satu contohnya, pemanfaatan label “lembaga riset” yang dimiliki UI untuk menjustifikasi kebijakan buruk pemerintah. Hal ini dapat tergambar dalam kasus “konsultasi publik” (dalam tanda petik) di salah satu universitas Kalimantan dekat proyek IKN. Kesempatan berbicara pada kegiatan yang membahas RUU IKN justru didominasi oleh pejabat kampus yang menyetujui pembangunan IKN saja. Dengan demikian, perubahan Statuta yang semakin membuka lubang intervensi ini dapat menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat legitimasi politik. Pada akhirnya, bentuk-bentuk formil inilah yang akan membunuh nyawa kebebasan akademik dan kemajuan ilmu pengetahuan di UI.

Perlunya Kepedulian yang Lebih Masif

Kendati telah banyak protes yang bergaung, gema penolakan tersebut hanya diimplikasi oleh mereka yang vokal, mereka yang berada di organisasi kemahasiswaan—itupun belum menyeluruh dan hanya mencolok dari divisi bidang Sospol. Gerakan ini nampaknya masih kurang merangkul *civitas* akademika awam.

Hal ini diungkapkan oleh Risa (nama disamarkan), seorang mahasiswi Fakultas Psikologi UI angkatan 2019 yang mengaku tak begitu memperhatikan per-

soalan tersebut. Ia mengetahui adanya huru-hara yang terjadi terkait Statuta UI, namun tidak begitu menyadari urgensi dari permasalahan ini.

“Gue tahu BEM beberapa kali menyoroti (Statuta -red) ini, tapi gue kurang *aware* aja ya. Ada setumpuk permasalahan di depan mata mahasiswa, dan mungkin bagi beberapa mahasiswa, persoalan Statuta ini masih kelihatan jauh,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia melihat situasi di sekitarnya bahwa polemik Statuta masih juga tak banyak dipahami oleh mahasiswa awam yang tak terlibat dalam organisasi pergerakan.

Sebagaimana yang diungkapkan Prof. Sulis, apatisisme ini tidak hanya terjadi di kalangan mahasiswa, namun juga menjadi problematika di kalangan tenaga pendidik.

“Tidak semua dosen peduli, tidak semua dosen mengerti infonya dan mau tahu apa yang terjadi, buat mereka yang penting ngajar aja, melakukan kegiatan akademik, selesai. Nah, itu yang amat disayangkan,” keluh Prof. Sulis. Selain segelintir kepedulian, terdapat tanda tanya lainnya tentang keberpihakan terhadap Statuta di kalangan tenaga pendidik. Misalnya, kendati statusnya sedang bermasalah, pada pemilihan calon Dekan kemarin, masih tercantum syarat ‘bersumpah setia’ pada Statuta. Terdapat persoalan etika dan hukum dalam aturan tersebut. Persoalan apatisisme ini tidak dapat dipandang sebelah mata, kepedulian yang masif perlu untuk diperluas, mengingat bahwa revisi Statuta UI ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang cenderung buruk bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan di UI.

Refleksi Dua Tahun Kampus Merdeka

Ditulis oleh: Siti Sahira Aulia, Aulia Maulida Az-Zahra, Allya Shafira

D iawali dengan kecamuk Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) tentang inovasi bagi mahasiswa, peluncuran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) akhirnya naik ke permukaan. Latar belakang yang inovatif untuk mendompleng mahasiswa agar kian adaptif dan siap terjun ke masyarakat disambut antusiasme yang tinggi, terutama bagi kalangan mahasiswa.

Sejak kemunculannya pada tahun 2020, beberapa program yang berhasil dikeluarkan MBKM menjadi topik perbincangan yang populer. Utamanya adalah perihal Magang Merdeka, Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Program-program tersebut disambut baik oleh mahasiswa karena memperluas kesempatan mereka untuk menambah pengalaman dan memperluas wawasan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya melakukan perkuliahan secara formal di kampus, tetapi juga terjun langsung dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Kemendikbudristek.

Dua tahun berjalan, kon-

troversi terus timbul-teng-gelam, pro-kontra tak dapat dilepaskan, dan perubahan terus diupayakan dalam menjalankan program-program ini. Sebab, masih terdapat celah carut-marut dalam pelaksanaannya. Lantas, selama dua tahun berjalan, bagaimana wajah program ini di mata mereka yang turut terlibat di dalamnya?

Kesiapan Universitas

Pelaksanaan Kampus Merdeka tentu melibatkan kerja sama dari pihak universitas. Dalam hal ini, kesiapan dari masing-masing universitas diuji karena dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak kampus merdeka dengan universitas agar kegiatan berjalan lancar. Lagipula, mahasiswa masih tercatat dan terikat sebagai bagian dari pihak universitas. Begitu pula bagi mahasiswa UI yang juga ambil bagian dalam program Kampus Merdeka, khususnya kegiatan magang dan pertukaran pelajar yang banyak diminati.

Kurikulum baru merupakan lonjakan perubahan baru yang dihadapi tiap universitas untuk siap merombak segala sistem yang sudah disusun sebelumnya. Pembimbing

program IISMA tahun 2021 lalu, Yandry Kasim Kurniawan, mengatakan bahwa kurikulum besutan Nadiem Makarim ini merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum sebelumnya yang baru berjalan dua tahun. Oleh karena itu, proses perubahan dan sosialisasi dimulai dari awal.

Kebanyakan mahasiswa UI mengaku mendapatkan informasi secara mandiri melalui berbagai media, seperti sosial media. Mulai dari informasi awal hingga tata cara pendaftarannya. Namun, ada pula mahasiswa yang mudah mendapat akses informasi melalui bantuan fakultas maupun dosennya. Jadi, setiap mahasiswa memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda perihal kesiapan universitas dalam koridor program Kampus Merdeka.

Menurut Yandry, proses sosialisasi program Kampus Merdeka dari pihak universitas ke prodi telah dilakukan sejak tahun 2021. Dia menganggap proses tersebut berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa teknis yang membingungkan karena situasi COVID-19 dan merupakan proses uji coba pertama. "Sosialisasi dilaksanakan dan proses berjalan dengan baik. Dan

yang perlu diingat, ini (tahun 2021—red) proses uji coba tahun pertama," ujarnya menegaskan.

Keluhan kerap terjadi di tahun pertama program ini berjalan, tetapi ia menganggap hal itu lumrah terjadi di dalam proses adaptasi. Dia menuturkan bahwa pada tahun 2022, terjadi perbaikan alur penginformasian sehingga menjadi lebih jelas. Pada awal tahun 2022, sosialisasi Kampus Mengajar dilakukan oleh ketua CIL (Center of Independent Learning). Proses itu lalu dilanjutkan ke manajer pendidikan tiap fakultas untuk kemudian turun ke dosen pembimbing akademik (PA) dan mahasiswa.

"Sehingga beberapa kebingungan di tahun pertama itu makin terurai," tukas Yandry menanggapi keluhan kesimpangsiuran berita pada program ini. Yandry menerangkan, informasi yang disebarkan pasti seragam sesuai dengan buku panduan. Hanya saja, ada ketentuan-ketentuan yang dilimpahkan kepada tiap program studi dan pembimbing akademik tiap mahasiswa. Oleh sebab itu, kebijakan seperti transfer SKS mungkin agak sedikit berbeda.

Kasus terkait keluhan mahasiswa diasumsikannya sebagai permasalahan internal. Hal itu mungkin juga terjadi akibat mahasiswa yang mengabaikan ketentuan dan pertimbangan dosen PA. Salah satunya adalah perihal transfer SKS yang berbeda-beda. Ketentuan perihal SKS ter-

sebut perlu memperhatikan aturan mutlak terkait SKS maksimal tiap semester dan keseluruhan semester. "Kebijakan MBKM sama dan peraturannya sama. Oleh karena itu, harus dilihat kasusnya satu-satu," terangnya menambahkan.

Terang-Gelap MBKM

Keberadaan program ini, tidak menutup mata, menarik mahasiswa berlomba-lomba untuk ikut berkontribusi. Tidak sedikit mahasiswa UI yang menyerahkan sejumlah berkas untuk mengikuti seleksi program MBKM. Meskipun, di antara mereka mengungkapkan mendapatkan informasi secara mandiri dengan mengikuti akun-akun media sosial yang berkaitan dengan MBKM.

Beberapa di antaranya mengaku tertarik dengan apa yang ditawarkan program ini kepada mahasiswa. Tentu saja, kemudahan itu mereka dapatkan untuk memperoleh beragam jenis pengalaman, baik itu pengalaman belajar maupun pelajaran bersosialisasi dalam lingkungan kerja yang profesional.

Hal itu pun diakui oleh salah satu mahasiswa UI yang mengikuti program Magang Merdeka, Larasati. Ia menilai program ini memudahkan mahasiswa karena adanya ribuan lowongan yang tersedia sangat membantu mahasiswa untuk memilih ditambah dengan ragam perusahaan dan *job desk* yang terdaftar.

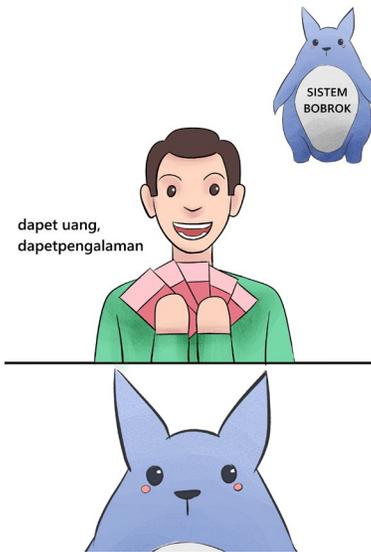
Magang tersebut dilakukannya ketika sedang menempuh

semester akhirnya di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), sehingga masalah yang menyangkut konversi Satuan Kredit Semester (SKS) tidak dapat dilakukan. "Ketika pada nanya kalau program ini bisa konversi atau ngga. Dikasih tahu kalau mahasiswa semester akhir ngga bisa konversi karena matkul sudah habis. Jadi, cuma dapat sertifikat pendamping ijazah," papar Laras.

Permasalahan terkait konversi SKS nyatanya cukup membekas di benak Laras. Selain permasalahan mahasiswa semester akhir, Laras pun menuturkan bahwa beberapa perusahaan menganggap para mahasiswa dapat melakukan kegiatan magang selayaknya pekerja pada umumnya. Ketidakselarasan informasi itu turut membuat Laras sempat mengundurkan diri lantaran harus mengimbangi diri dengan proses perkuliahan yang masih berlanjut.

"Ada temanku, dia bisa dikonversi tapi cuma 3 SKS karena dia belum ambil (matkul—red) magang. Jadi, magangnya ambil magang Kampus Merdeka. Jadi itu, angkatan di bawahku cuma bisa konversi 3 SKS, bukan 20 SKS," ujar Laras menambahkan.

Namun, permasalahan yang bersinggungan dengan SKS tidak dialami Baihaqi Nurhammam Jatim, mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) angkatan 2019. Selama dua kali mengikuti program ini, ia mengaku bahwa konversi SKS yang dilakukannya berjalan tanpa hambatan.



dapet uang,
dapet pengalaman

Ilustrasi: Brilian Kusumangera

Di samping itu, berbeda dengan Laras yang merasa lingkungan kerja magangnya yang menyenangkan, Baihaqi justru mendapati adanya lingkup kerja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Kebetulan dapet mentor sama *team mate* yang *zonk*. Jadi, mentornya gak ngasih bimbingan, *team mate*-nya juga ada yang pasif,” ungkapnya.

Akan tetapi, pengalaman Laras tidak semulus itu. Ia pun mendapati celah kekurangan dari program Magang Merdeka yang dirasakannya. Seperti yang sudah diketahui bahwa program Magang Merdeka tidak hanya diikuti oleh satu universitas, melainkan berbagai universitas. Hal itu memungkinkan adanya berbagai kesalahan dalam pelaksanaan program. Bagi Laras, kesamaan nama yang dimilikinya dengan mahasiswa lain menjadi awal mula adanya kendala dalam kegiatan magangnya. Nama “Larasati” yang juga dimiliki oleh mahasiswa dari

universitas lain membuat insentifnya sempat tidak cair, lantaran terjadinya proses salah transfer.

“Karena namaku cuma *Larasati*, jadi dari kampus lain sempat ada nama yang sama. Terus, ada kesalahan saat transfer gaji. Uangku masuk ke rekening atas nama *Larasati* dari kampus lain. Awalnya mengira kalau uangnya memang belum masuk aja,” terang Laras.

Lantas, Laras menghubungi pihak Magang Merdeka mengenai hal yang dialaminya. Kemudian, ia diajak untuk bergabung dengan akun Telegram program Kampus Merdeka. Ia mengaku bahwa pihak Magang Merdeka menyarankan uang *Larasati* dari universitas lain diserahkan terlebih dahulu ke pihak Magang Merdeka. Tentunya, hal itu justru membuat lambat proses penanganan kejadian. Alhasil, Laras berinisiatif untuk mencari informasi perihal akun sosial medianya *Larasati* dari universitas lain. Kemudian, melakukan proses transfer melalui rekening pribadi.

“Saran dari pihak Kampus Merdeka, uang dari *Larasati* kampus yang berbeda itu harus diserahkan dulu ke pihak kampus merdeka. Hal itu justru bikin lama dan ngga ada progress sama sekali. Akhirnya, ditransfer menggunakan rekening pribadi,” ungkap Laras.

Lain halnya dengan Laras, Baihaqi tidak mengalami pengalaman yang serupa. Ia mengaku bahwa insentifnya berjalan lancar. Walaupun ada

teman-temannya, yang mengikuti program Magang Merdeka, mengalami keterlambatan pemberian insentif. Hanya saja, ia merasa kegiatan magang yang dilaluinya berjalan tanpa kontrak yang jelas karena aturan dan perjanjian lainnya yang tidak tergambar secara detail dan nyata.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi indikasi bahwa sistem dari program Magang Merdeka masih kurang jelas. Ia juga merasa belum adanya sinkronisasi antara pemerintah dan pihak penyedia tempat magang tersebut sehingga mahasiswa dibuat kebingungan dengan aturan pelaksanaan program Magang Merdeka.

Selain itu, Baihaqi merasa waktu pelaksanaan seleksi terkesan tergesa-gesa dan padat. Salah satu kendala yang ia alami adalah linimasa seleksi perusahaan yang tidak serentak. Ia menuturkan tidak memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan atau bahkan menyelesaikan seluruh wawancara dari perusahaan-perusahaan pilihannya karena jangka waktu konfirmasi ke perusahaan terkait yang cenderung pendek.

Di lain sisi, salah satu teman Baihaqi pun juga mengalami dampak dari linimasa yang tidak seragam ini. Ketika teman-temannya yang lain sudah menyelesaikan MBKM di perusahaan masing-masing, ia baru saja memulai MBKM di perusahaan pilihannya. Sehingga, ia tidak dapat merasakan euforia yang sama dengan teman-temannya untuk program MBKM ini.

Pengalaman Belajar di Luar Negeri, Layakkah?

Berbanding terbalik dengan mahasiswa Magang Merdeka yang kebanyakan memperoleh informasi dari akun-akun eksternal UI, mahasiswa yang menjadi *awardee* dalam IISMA nyatanya dimudahkan dengan keberadaan akun Instagram @ui_international. Dari akun itulah, para calon *awardee* mengais informasi terkait program pertukaran pelajar yang digagas Kemendikbudristek.

Lancarnya informasi yang dibagikan oleh pihak-pihak terkait tidak hanya berlaku di media sosial, Ancilla Renya Damarasri, mahasiswi Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) UI 2019, yang mengikuti program ini menyatakan pihak-pihak tersebut turut mengadakan pertemuan dengan calon *awardee* untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan program IISMA.

“Fakultas saya, Fakultas Ilmu Keperawatan, melakukan sosialisasi melalui Instagram. Selain itu, dosen saya sangat aktif mengajak mahasiswa untuk mengikuti program ini,” tutur mahasiswi yang biasa disapa Cilla tersebut. Ia menilai para dosen sangat suportif memberikan dukungan dan perhatian terhadap berjalannya program ini.

Peran tenaga pendidik pulalah yang menjadi alasan paling berat bobotnya terhadap keputusan Cilla mengikuti program IISMA. “Saya mendaftar karena diajak oleh dosen saya. Awalnya, saya ragu

karena waktu pendaftaran akan tutup dalam beberapa hari, tapi saya merasa lebih baik saya kecewa karena tidak diterima daripada kecewa karena tidak mendaftar sama sekali,” paparnya.

Kemantapan tekad yang berhasil dikumpulkan itulah yang membawanya menempuh pendidikan selama satu semester di University of Glasgow, Skotlandia pada semester gasal lalu, yakni September 2021.

Namun, kasus COVID-19 yang merangkak naik tahun lalu berimbas pada penundaan program yang sudah disusun oleh berbagai pihak ini. Cilla menyampaikan, untuk kasusnya, ia merasa cukup beruntung karena dapat mengikuti program di tahun tersebut. “Saya bersyukur saya dan teman-teman dapat berangkat semester lalu. Sayangnya, banyak teman-teman yang ke Asia yang terpaksa ditunda keberangkatannya.”

Meskipun, keberuntungan itu tidak sepenuhnya dapat dirasakan, para mahasiswa *awardee* IISMA yang menetap di negara orang harus berpuas dengan melaksanakan perkuliahan secara *hybrid*.

“Mengingat masih pandemi, kami menjalankan kuliah secara *hybrid*. Kami hanya datang ke kampus saat seminar atau praktikum,” ujar Cilla. Meskipun begitu, ia mengaku tetap bersyukur mengingat pengajar yang mendampingi mereka melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Segala lika-liku program yang ditawarkan Kampus Merdeka, tak ayal membuat perlombaan terjadi untuk memperebutkan, paling tidak, kesempatan mengais pengalaman bagi mahasiswa. Walaupun, menurut mahasiswa yang mengikuti program itu, masih ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin dikatakan sebagai jajak pertama program ini diterapkan sejak berubahnya kurikulum pada 2018 dan disusul 2020 lalu. Perubahan itu membutuhkan adaptasi yang tidak mudah, terlebih di tengah kondisi pandemi.

Banyaknya program yang ditawarkan memang terdengar menggiurkan, tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. “Hemat saya, sependek pengetahuan saya sekarang, di tingkat fakultas itu masing-masing prodi perlu melihat dari delapan program MBKM, kuatnya di mana,” Yandry menyampaikan pendapatnya. Hal ini dinilainya sebagai sarana mengunggulkan tiap fakultas untuk tujuan pencapaian di tingkat universitas.

Namun, di lain sisi, program ini merupakan program yang memiliki masa periode tertentu. Lantas, sampai titik mana program-program cemerlang yang masih terus berkembang ini akan berjalan? Sejauh apa perubahan yang ingin diciptakan oleh para pencetus sekaligus para kontributor program ini?

Jelajahi Makanan Legendaris di UI, Sudah Pernah Coba Belum?

Ditulis Oleh: Zakiya Rozqi Auliya, Salma Rihhadatul Aisy



Kantin Asrama UI

Kantin Asrama UI dibangun sebagai fasilitas penyedia kebutuhan makanan bagi penghuni asrama maupun mahasiswa UI secara umum. Dengan desain yang luas, Kantin Asrama UI juga berguna sebagai tempat berkumpul bukan hanya penghuni asrama namun banyak mahasiswa UI. Disamping itu, Kantin Asrama UI memiliki keunikan tersendiri yaitu sistem prasmanan. Disini, pembeli bisa mengambil sendiri porsi dan menu makanan yang akan ia makan. Menu makanan yang disediakan pun banyak variasinya. Tidak salah lagi jika anak luar asrama ingin membeli makanan disini karena harga yang murah dan ramah di kantong.

“Masakan di sini kayak masakan rumahan, jadi nostalgia sama masakan ibu di rumah.” (-zky)



Kimpul

Kimpul merupakan salah satu warung makanan yang dulunya berada di kantin FH. Kimpul menawarkan makanan dengan harga murah meriah mulai dari Rp6.000 di awal berdirinya. Kimpul akrab bagi anak FH angkatan atas. Bahkan pemberian nama Kimpul pun berasal dari anak-anak FH yang sering nongkrong di warung ini. Namun, karena adanya renovasi kantin di Fakultas Hukum menyebabkan Kimpul bergeser ke luar kampus. Sekarang keberadaan Kimpul terletak di dekat pintu Barel, belakang Halte FH, dengan pelanggan dari anak UI maupun anak Gunadarma. Bagi anak kos yang ada di Barel pasti udah ga asing lagi sama warung Kimpul ini.

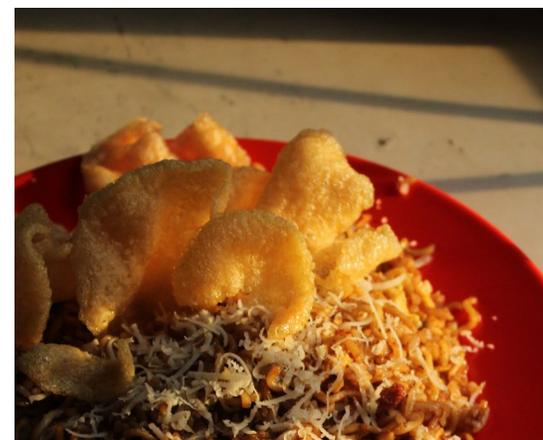
“Makanan di Kimpul enak apalagi nasi telurnya dimakan pas anget.” (-zky)



Mie Warna-warni Perpusat

Perpustakaan Pusat UI menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh sivitas UI sehingga tak jarang banyak juga orang yang berkunjung ke Kantin Perpusat untuk mengisi perut. Di Kantin Perpusat hanya terdiri dari beberapa warung makanan. Namun, ada salah satu yang menarik di sini yaitu mie warna-warni. Mie warna-warni yang ada di Kantin Perpusat memiliki penampilan yang unik dan menarik, dengan harga mulai dari Rp18.000. Selain itu, warna pada mie ini terbuat dari sayuran sehingga sehat untuk dikonsumsi. Ada banyak varian rasa mie yang disuguhkan oleh penjualnya.

“Mie disini unik, lucu, warna-warni, dan banyak toppingnya. Rasanya juga enak, apalagi mie yaminnya cocok banget di lidah.” (-zky)



Warung Nastel

Warung nastel juga tak kalah menarik untuk dikunjungi. Berdiri sejak tahun 2000, warung nastel menjadi salah satu tempat makanan

favorit warga UI karena jaraknya yang dekat, rasanya yang enak dan pastinya harga terjangkau. Warung ini disebut Warung Nastel tentu saja karena menu terfavorit di sini adalah Nastel alias Nasi Telur. Menu andalan yang biasa di pesan di Warung Nastel ini adalah Nastel Kornet Keju. Warung Nastel sudah buka mulai pukul 7 pagi hingga 12 malam.

“Nasi, telur, kornet, dan keju ternyata bisa menjadi perpaduan enak yang bikin nagih!” (-slm)



Mie Ayam Sengketa

Mau makan mie ayam porsi banyak, tapi harga merakyat? Mie Ayam Sengketa jawabannya. Ada sejarah di balik penamaannya yang unik ini. Pada awalnya, Mie Sengketa ini berlokasi di dalam kampus, di antara FIB dan FISIP. Lokasinya yang terletak di antara dua fakultas, membuat mahasiswa sering mengklaim nama mie ayam ini sebagai Mie Ayam FIB, Mie Ayam FISIP, Mie Ayam Pardos (Parkiran Dosen), Mie Ayam Konflik, dan nama panggilan lain yang dibuat sendiri oleh warga UI. Nama Mie Ayam Sengketa kemudian muncul saat mie ayam ini pindah dan menetap di FIB, pemilik mie ayam ini kemudian membuat tulisan Mie Ayam Sengketa di gerobaknya untuk mengakhiri sengketa klaim antara FIB dan FISIP. Kalau berniat mampir dan makan di Mie Ayam Sengketa, jangan lupa coba mie yaminnya, ya!

“Mie ayamnya kenyal banget! porsinya banyak, dan harganya merakyat.” (-slm)

Sekat-Sekat Gerakan Rakyat: Barisan Mahasiswa Milik Siapa?

Ditulis Oleh:
Khadijah Putri Rahmadewi, Khoirul Akmal W., M. Rifaldy Zelan

Beberapa waktu lalu publik sempat diramalkan oleh isu presiden tiga periode dan penundaan masa pemilu. Merespon hal ini, kelompok mahasiswa melaksanakan dua aksi untuk menentang kedua wacana tersebut, yaitu pada tanggal 11 April 2022 yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan tanggal 21 April 2022 dengan penyelenggara Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI). Pada aksi 21 April yang bertajuk “Habis Rezim Gelap Terbitlah Terang”, terdapat peristiwa yang cukup menarik perhatian masyarakat yakni penangkapan Syahdan Husein, seorang anggota Blok Politik Pelajar (BPP).

Syahdan diduga melakukan provokasi setelah sebelumnya ia mengeluarkan kata kasar kepada orator yang berdiri di atas mobil komando. Perbuatan kasar itu dilayangkannya

sebagai ekspresi penolakan Syahdan atas pernyataan orator yang mengatakan bahwa peserta aksi harus menggunakan almamater kampus. Buntut dari peristiwa ini, Syahdan mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat mendapat tindakan represif dari aparat.

Ketika diwawancarai oleh tim Suara Mahasiswa UI, Syahdan menceritakan kronologi terjadinya penangkapan atas dirinya. Berdasarkan penuturan Syahdan, saat itu massa aksi tengah bergerak menuju Patung Kuda dan dihentikan di tengah-tengah kegiatan long march. Ketika long march terhenti, terdapat orasi yang kemudian melatarbelakangi penangkapan Syahdan. Pada orasi itu Syahdan melihat orator memisahkan antara massa yang beralmamater dengan massa yang tidak beralmamater.

“Di situ orator bilang, selain mahasiswa tidak dibolehkan atau tidak diizinkan (untuk masuk ke dalam barisan – red),” ujar Syahdan meniru ucapan sang orator. Mendengar imbauan tersebut, emosi Syahdan terpantik. Ia melanjutkan, “Nah, saya di situ sontak heran dan kaget, saya kesal juga, kok, diulang pola pikir paradigma yang seperti ini (eksklusivitas -red).” Spontan Syahdan pun melontarkan kata ‘tai’ dua kali yang kemudian menarik atensi aparat.

Respon Syahdan tersebut lantas dianggap provokatif oleh aparat. Padahal, spontanitas itu merupakan bentuk kekecewaan Syahdan atas gerakan mahasiswa yang dinilai memisahkan diri dari rakyat. “Saya lihat antarmahasiswa aja masih pecah-pecah, ini kenapa lagi memberi batasan kepada rakyat yang bukan mahasiswa,” ungkap Syahdan.

Penangkapan Syahdan menjadi salah satu bukti bahwa eksklusivitas dalam gerakan mahasiswa masih sangat kental sehingga menciptakan sekat yang begitu tebal antara kalangan mahasiswa dan massa aksi yang bukan mahasiswa. Fenomena eksklusivitas nyatanya bukan hanya terjadi pada aksi 21 April saja, tetapi budaya elit ini memang telah lama menjadi bahasan yang hingga saat ini tidak ada habis-habisnya.

Melacak Akar Eksklusivitas Gerakan Mahasiswa

Eksklusivitas gerakan mahasiswa bukanlah hal yang baru di Indonesia. Fenomena ini sejatinya telah muncul sejak awal masa Orde Baru. Para pengamat menilai fenomena ini terkait erat dengan identitas gerakan mahasiswa sendiri sebagai gerakan moral. Gerakan moral dalam artian bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa itu bertaut dengan keistimewaan yang ia miliki dan termotivasi oleh moralitas semata dibandingkan ambisi dan minat pribadinya. Karena dimotivasi oleh moralitasnya, maka gerakan moral mendorong mahasiswa untuk tidak beraliansi dengan

gerakan sosial atau kelompok masyarakat lain supaya tidak tercemar kemurnian niatnya.

Arief Budiman dalam tulisannya berjudul Peranan Mahasiswa Sebagai Intelektual (1983) mengumpamakan aktivisme mahasiswa yang dilandasi gerakan moral selayaknya seorang resi. Resi-resi sebagaimana yang dikenal dalam kehidupan budaya masyarakat Jawa, terkenal tidak memiliki ambisi kekuasaan dan muncul ketika keadaan sudah genting dengan mengingatkan penguasa. Gambaran itu serupa dengan aktivisme gerakan moral yang ditunjukkan para mahasiswa di masa awal Orde Baru berkuasa.

Kemudian, mengapa ide gerakan moral dapat berkembang di tengah aktivisme gerakan mahasiswa?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengulas realitas sosial politik ketika ide tersebut lahir. Gerakan moral yang lahir di masa awal Orde Baru dibentuk oleh pandangan para pegiat gerakan mahasiswa sendiri seperti Arief Budiman dan Soe Hok Gie yang kemudian dirawat dengan baik tak hanya oleh mahasiswa saja, tetapi juga aparat dan pejabat negara.

Edward Aspinall dalam *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness* (2012), mengemukakan bahwa pada awalnya, cara pandang yang memicu eksklusivisme ini lahir sebagai bentuk pertahanan diri mahasiswa dari tindakan koersif dan kooptasi yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru.

Tindakan koersif atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah Orde Baru terlihat jelas dalam pembungkaman berbagai kritik tajam yang diarahkan padanya. Dalam iklim politik demikian, maka sudah sewajarnya mahasiswa membingkai gerakannya bukan sebagai gerakan politik yang bertujuan menggulingkan pemerintah dan terafiliasi dengan kelompok oposisi, namun sebagai gerakan moral. Setelah dibentuk dan disebarluaskan oleh aktivis mahasiswa di masa awal Orde Baru, gagasan gerakan moral dalam gerakan mahasiswa diperkuat oleh himbuan rutin oleh pihak militer yang mewanti-wanti agar mahasiswa jangan sampai ditunggangi kepentingan politik supaya gerakannya tetap ditolerir oleh pemerintah. Faktor lain yang turut mendorong kela

hiran ide gerakan moral bagi mahasiswa adalah fenomena kooptasi. Pemilihan wakil-wakil dari elemen mahasiswa untuk turut duduk dalam kursi parlemen pasca lengsernya Soekarno menjadi penanda dimulainya kooptasi pemerintah Orde Baru terhadap gerakan mahasiswa. Melihat fenomena ini, beberapa aktivis gerakan mahasiswa yang masih kritis mencoba menggaungkan gagasan utama dari gerakan moral berupa tugas mahasiswa untuk meluruskan dan memperingati penguasa yang ada dan tidak terlibat dalam sistem alternatif baru. Sehingga ketika perjuangan mereka usai, sudah sebaiknya mereka balik badan dan tidak terseret dalam kontestasi politik ala elit.

Niat baik untuk mempertahankan eksistensi gerakan di tengah cengkraman pemerintah otoriter realitanya justru mempersulit gerakan mahasiswa sendiri. Gerakan moral yang dianut oleh gerakan mahasiswa di awal kekuasaan Orde Baru justru mengandung sejumlah permasalahan. Alih-alih memberikan mahasiswa bahan bakar untuk kritis, gerakan moral justru memicu eksklusivisme yang berlebihan.

“Mereka memisahkan diri dengan rakyat, tidak punya basis massa, menolak membangun aliansi, tidak memiliki alternatif lain dari sistem yang telah ada, menempatkan diri sebagai kelas yang lebih superior, bersifat spontanitas, dan konservatif,” tulis Arif Novianto dalam Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik Terhadap Gerakan Moral (2016).

Kelemahan-kelemahan tadi menempatkan gerakan mahasiswa Orde Baru dalam posisi yang problematik. Karena di satu sisi kerap mengaku dirinya sebagai perwakilan suara rakyat yang dibungkam, tetapi di sisi lain justru terpisahkan darinya. Kondisi demikian menghambat gerakan mahasiswa untuk mencapai perubahan sosial yang diimpikannya. Perubahan baru mulai terjadi ketika beberapa mahasiswa angkatan 80-an belajar dari kesalahan para pendahulunya.

Pembelajaran itu didapat mahasiswa setelah mereka dipaksa membaur dengan dunia luar seiring dengan diberlakukannya NKK/BKK yang berakibat pada mati surinya pergerakan dalam kampus. Depolitisasi yang terjadi di dalam kampus mendorong

mahasiswa untuk mulai membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lain di masyarakat. Perlahan namun pasti, jejaring pergerakan di luar kampus ini berkembang dan turut menghidupkan iklim pergerakan yang lebih inklusif. Jaringan aliansi inilah yang nanti juga turut berperan dalam mendorong keruntuhan Orde Baru di medio akhir 90-an.

Dilema Penggunaan Almamater Saat Aksi

Almamater adalah objek yang penting untuk digunakan saat aksi. Hal ini agar massa aksi, yang mana hampir semua adalah mahasiswa, dapat menunjukkan institusi mereka masing-masing. Tujuannya agar tidak ada “penyusup” atau orang lain yang memiliki maksud tertentu, yang biasa disebut provokator, dapat bergabung dengan massa aksi. Penggunaan almamater ini pun membentuk fenomena eksklusivisme mahasiswa.

Kekhawatiran mahasiswa yang melakukan aksi memang kerap terbukti. Salah satu kasusnya adalah peristiwa polisi tangkap tiga penyusup saat aksi di Palembang pada 11 April 2022. Tiga penyusup tersebut menggunakan jaket

almamater Universitas Sriwijaya. Walaupun salah satu dari mereka mengaku hanya ikut-ikutan saja dan sama sekali tidak mengetahui tuntutan aksi pada hari itu, hal ini tetap membuat para mahasiswa khawatir, kalau-kalau ada oknum lain yang memang memiliki niat buruk untuk memprovokasi.

Di samping itu, ada pula peristiwa yang menunjukkan bahwa eksklusivitas gerakan mahasiswa ini tidak selalu baik. Seperti pada kejadian yang terjadi saat aksi di Jakarta, 21 April 2022—kejadian saat Syahdan ditangkap polisi karena diduga provokator. Syahdan merasa jengah dengan orator yang menyerukan bahwa siapapun yang tidak memakai jaket almamater adalah provokator. Tatkala mendapati Syahdan tengah diberangus polisi akibat ekspresi ketidaksetujuannya, orator tersebut bahkan memimpin massa aksi untuk menyanyikan jingle, “Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi!” Nyatanya, Syahdan adalah bagian dari massa aksi dan bukan merupakan provokator. Ia tergabung dalam Blok Politik Pelajar (BPP) dan tidak memakai jaket almamater karena ia

sudah bukan lagi merupakan mahasiswa.

Berdasarkan artikel yang ditulis Ahmad Shalahudin di Kumparan, 27 April 2022, karakteristik mahasiswa khas post-Orde Baru telah diwariskan sampai sekarang. Menurutnya, tingkah mahasiswa dalam aksi tersebut seperti seolah-olah hanya mereka yang memiliki hak untuk mewakili keresahan rakyat, dalam konteks ini adalah demonstrasi.

“Dengan meneriakinya siapa saja yang tidak berjaket almamater sebagai provokator, gerombolan mahasiswa kelas menengah itu tak jauh berbeda dengan negara Orde Baru yang meneriakinya siapa saja yang tidak sejalan dengan sumpah serapah ‘komunis’,”
 -Ahmad Shalahudin

Fenomena eksklusivitas mahasiswa ini memang tidak bisa dihindari. Terlebih rakyat hanya dapat bergantung kepada mahasiswa jika ada sesuatu yang bermasalah dalam negara ini, membuat mahasiswa dipandang menjadi Agent of Change dan diharapkan dapat membawa perubahan. “Masyarakat masih harus banting tulang cari uang untuk makan hari itu juga, gitu.

Untuk turun ke jalan, juga ya, pastinya terhalangi oleh jam-jam kerja mereka. Jam-jam mereka cari uang. Jadi masyarakat mempercayakan itu secara tidak langsung (kepada mahasiswa),” ujar Syahdan saat diwawancarai.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan jaket almamater saat aksi masih menjadi dilema. Tujuan penggunaannya adalah untuk mencegah provokator menyusup ke dalam massa aksi. Namun, ia juga menutup ruang bagi masyarakat biasa yang ingin masuk ke dalam barisan aksi. Meski begitu, semua orang baik mahasiswa maupun bukan memiliki hak untuk mengikuti aksi dan menyuarakan pendapat mereka, serta mewakili rakyat Indonesia.

“Nggak ada hierarki, mau pake almamater, non almamater, kita punya hak sama. Tapi ketika ada rakyat yang ikut selain mahasiswa, dia juga punya hak suara yang sama,” jelas Syahdan.

Mari kita berefleksi kembali, apakah jaket almamater dalam aksi bak “identitas” yang digunakan hanya untuk melambungkan ego mahasiswa?



Lokasi: Balaiung - Annex
foto: barrel

MENYAMBANGI 5 SUDUT
TERSEMBUNYI UI



Lokasi: Balaiung - Annex
foto: Almas



Lokasi: RS UI
foto: barrel



Lokasi: Jembatan Teknas
foto: Almas



Lokasi: Jl. Boulevard
foto: Almas



Lokasi: baljest UI
foto: barrel

Eksklusivitas Pergerakan Mahasiswa di Indonesia

Oleh Feronica Permata Surya, FMIPA UI

Pergerakan mahasiswa merupakan bentuk kegiatan mahasiswa yang ada di dalam maupun luar perguruan tinggi, dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kecakapan, dan intelektualitas. Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia telah dimulai pada abad ke-20 dengan sebuah gerakan mahasiswa yang memiliki nama Boedi Oetomo. Setelah itu, terdapat gerakan mahasiswa lainnya seperti Kelompok Studi Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, Persekutuan Nasional Indonesia, Persekutuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), Mahasiswa Menggugat, dan lain sebagainya.

Berbagai pergerakan mahasiswa di Indonesia memiliki spesialisasi gerakannya masing-masing, seperti pergerakan dalam bidang sosial politik, HAM, lingkungan, jurnalistik, kebudayaan, dan lain-lain. Masing-masing pergerakan mahasiswa tersebut akan bergerak dengan visi dan misi yang dimilikinya, sehingga akan terlihat keragaman dari berbagai pergerakan mahasiswa yang dapat menyempurnakan realitas demokrasi di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali masing-masing dari pergerakan

mahasiswa tersebut merasa tidak ingin memiliki pesaing dan menjadi satu-satunya pergerakan mahasiswa yang memimpin. Dengan pemikiran seperti itu, maka pergerakan mahasiswa tidak akan bekerja sama dan cenderung saling menjatuhkan, mementingkan spesialisasi gerakannya sendiri sebagai hal yang harus jadi nomor satu, dan mengutamakan branding atau pencitraan pergerakan mahasiswa masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan eksklusivitas pergerakan mahasiswa.

Istilah “Eksklusivitas” berasal dari kata “Eksklusif” yang berarti terpisah dari yang lain. Dengan bersifat eksklusif, maka seseorang cenderung memisahkan diri —baik secara langsung maupun tidak langsung— dari suatu kelompok.

Eksklusivitas pergerakan mahasiswa yang demikian dapat membuat suatu pergerakan mahasiswa laai dari tujuan awalnya, yaitu membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Padahal, agar mampu mencapai tujuan, masing-masing pergerakan mahasiswa perlu saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut semestinya disadari oleh masing-masing pergerakan mahasiswa agar dapat memenuhi tujuan awal dari pergerakan mahasiswa.

Eksklusivitas pergerakan mahasiswa juga dapat dilihat dari berbagai demonstrasi mahasiswa setelah era orde baru. Tidak jarang para demonstran dari rombongan mahasiswa mengklaim peranannya sebagai penyambung lidah rakyat kepada para pejabat. Selain itu, sering kali demonstran mahasiswa meneriakkan sesama demonstran dengan label “provokator” tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Perilaku eksklusif seperti itu dapat menyebabkan situasi demonstrasi menjadi panas dan genting. Danial Indrakusuma dalam Akhmad (2015) pernah menyampaikan pemikirannya mengenai pergerakan mahasiswa pada era orde baru. Ia menyampaikan bahwa “Mere-

ka sering berlandung di balik kata (benar-benar hanya kata-kata) taktik, tapi dalam realitas mereka tak pernah melakukan tindakan politik dengan kekuatan mobilisasi massa.”

Sifat eksklusivitas dalam pergerakan mahasiswa dapat menjadi masalah yang besar. Hal tersebut dikarenakan tokoh yang dianggap vokal dalam suatu pergerakan mahasiswa dapat dengan mudah merendahkan mahasiswa lain yang tidak memiliki visi yang sama dengannya. Selain itu, eksklusivitas juga dapat menyebabkan inkonsistensi gerakan.

Pergerakan mahasiswa sudah seharusnya dilakukan dengan semangat keterbukaan dan kebersamaan, bukan dengan antipati dan anarkisme. Spesialisasi gerak dari masing-masing pergerakan mahasiswa perlu dipertahankan dengan menjaga karakter dasar dari pergerakannya. Sehingga tujuan utama dari pergerakan mahasiswa yang berupa membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Catatan:

Opini ini telah melewati proses penyuntingan PUEBI dan tata bahasa oleh tim redaksi Pers Suara Mahasiswa UI.

Referensi:

- Adryamarthanino, V. (2021, Agustus 29). Sejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia, Sejak 1908 hingga Reformasi.
- Akhmad, Fazlur. (2005). *The Indonesian Student Movement: A Force for Radical Social Change?*
- Baidawi, N. K. (2015). Bentuk-Bentuk Strategi Adaptasi Masyarakat Pendatang. *Jurnal Adaptasi*, 7-8.
- Bintang, A. (2021, Desember 7). *Gerakan Mahasiswa dan Problematika di Dalamnya*.
- Rita Indawatik, D. T. (2013). Eksklusivitas Siswa (Studi Fenomenologi Pola Eksklusivitas Pada Kelas Unggulan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012).
- Shalahudin, A. (2022, April 27). Eksklusivisme Berbalut Almamater: Otokritik terhadap Gerakan Mahasiswa.

Dipandang Rendah

Oleh Ikhwa Amalia - FIK UI

Aku terkekang oleh makian dari segelintir orang. “Tidak berpendidikan” adalah gelar yang harus terus kubawa dikala kaki merangkak maju untuk meneruskan hidup yang pilu. Siapa bilang wajahku tidak memiliki urat malu? Disaat tangan seharusnya lancar menulis diatas buku untuk men-glamorkan mimpi-mimpi tanpa takut dirampas debu. Nyatanya, tanganku terlalu menjijikan untuk mendapatkan hak pendidikan yang katanya menjadi tanggung jawab negeriku. Nyatanya, aku dinobatkan sebagai sampah masyarakat hanya karena menjadi bagian dari orang pinggiran yang mencemarkan estetika jalanan.

Mereka bilang, aku hanya peduli dengan uang. Pikiran dangkal yang terus menusuk telingaku. Katanya, orang-orang sepertiku hanya menginginkan sesuap nasi sehingga menjadi pelajar bukanlah prioritas hidup. Katanya, itulah nasib yang harus aku tanggung karena orang tuaku tidak pernah meleak dengan yang namanya belajar. Persetan semua ucapan yang memandang sebelah mata! Tidakkah kau tatap diriku? Meringis dalam hati. Berharap mengerti apa itu presentasi dikala melihat para pelajar berdiskusi sambil memanfaatkan teknologi untuk memajukan negeri.

Kepada Tuan dan Puan, Sang Penguasa Negeri yang Abadi. Hidup dalam kemiskinan tanpa pendidikan sangat menyakitkan. Bukan hanya stigma masyarakat yang melelahkan jiwa dan raga, melainkan juga melihat kelakuan negeriku sendiri yang tidak memperjuangkan hak-hak anak cucunya. Pandai sekali mengucapkan bahwa kini pendidikan sudah merata. Apanya yang merata? Perampasan hak-haknya? Pandai sekali memerintahkan para cendekiawan yang belajar di luar negeri untuk mengabdikan pada bangsanya sendiri. Mari, mengaca! Lihat, apa yang kau lakukan pada generasimu sendiri?



Mata Pisau Pendidikan

Oleh Doni Setiawan - FMIPA UI

Sekarang tinggal kau memilih
Mana mata pisau yang sekiranya kau gunakan
Membangun kepintaran atau sekadar “memintari”
Arif dengan kalis atau naif lamun bengis

Benar jika mengatakan pendidikan adalah sinar di gulita malam
Benar jika mengatakan pendidikan adalah pisau penghujam kebodohan
Sisi lain, pendidikan dijadikan tunggangan kekerasan secara halus
Kebodohan boleh tuntas, kelicikan tidak pernah lepas

Banyak manusia terdidik secara akademis yang sadis
Menikam halus, merongrong kebahagiaan insan kelimpungan
Pendidikan justru mereka jadikan jalur bengis pembedikan
Pembedikan dibalut alibi kebahagiaan, padahal kesengsaraan

Jangan lagi asah mata kenistaan
Cukup! banyak insan menjerit pengampunan
Rakyat bukan wayang diatur dalang
Katanya terdidik, kok menghardik?

Sisi mata pisau yang memancarkan sinar
Menceritakan pendidikan sebagai jembatan kemerdekaan
Ada yang mengentas kemiskinan, ada yang sekadar mengusir kekejian
Selayaknya, inilah takrif pendidikan

Mata pisau terasah kepada kearifan
Jeremba mimpi yang tak bertuan
Tidak lagi mengharap tanpa kepastian
Pendidikan, tetaplah menjadi hal baik yang terdepan

Pelesir

Oleh Ahmad Maghroby - FISIP UI

Aih, begini rasanya
Mereguk manis pengetahuan
Berpikir dalam denyut peradaban
Bergulat dengan pertanyaan

Vakansi, waktunya pulang! Dan segera terbayang misi peradaban dan medan pencerahan
Ku bawa koper dan ku tata rapi isinya:
Diktum-diktum, mantra kemajuan, seperti hafalan panjang

Kulangkahkan kaki menuju warung kopi: Kerja kebudayaan!
“Kita harus lepas dari hegemoni-hegemoni...”
Dan kawan-kawanku malah membrondongku persoalan pinjol, leasing, pupuk,
dan pemilihan Pak Kampung

Dan mereka memberikanku pertanyaan yang lebih nyaring dari para ilmuwan:
Jurusanmu nanti kerja apa?

Oh, nobody says, it was easy. It's such a shame: aku pulang merengut, seperti pedagang minyak wangi tak laku



Study, Collaborate, And Living at Evencio Premium Student Residence

Dikembangkan oleh PT PP Properti Tbk yang merupakan Anak Perusahaan BUMN PT PP (Persero) Tbk dengan portofolio properti dan kredibilitas terbaik. Salah satu portofolio produk PT PP Properti Tbk adalah Student Residence yang memiliki diferensiasi serta dikemas dengan tagline Beyond Space. Evencio merupakan Premium Student Residence yang memiliki keistimewaan dengan konsep baru Dual Key & Triple Key di mana di dalam satu unit bisa memiliki 2 & 3 kunci yang terpisah ke masing-masing kamar.

Selain itu juga terdapat unit Studio, 1 Bedroom, dan 2 Bedroom.

Evencio berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti sukses. Konsep Evencio dipersembahkan untuk mendukung aktivitas millennials dan investor yang sukses, produktif, dan dinamis. Berada di jantung Kota Pendidikan terbesar se-Jabodetabek yaitu Jalan Margonda Raya Kota Depok, Evencio memenuhi semua kebutuhan dan gaya hidup di kawasan kampus paling bergengsi di Indonesia

Fasilitas dan fitur Even-

ciio sangat menunjang kebutuhan millennials untuk aman dalam pergaulan. Evencio telah bekerjasama dengan BNN yang menjadikan Evencio apartemen bersih narkoba dan mendapatkan Stevie Awards 2018/2019 sebagai **APARTMENT FOR DRUG PREVENTION, FIRST IN INDONESIA AND THE WORLD** dengan kategori Innovation Consumer Product Service. Selain itu di Evencio terdapat Co-Working Area sehingga dapat mengakomodir kegiatan belajar, berkolaborasi, dan bekerja millennials.



Area hijau terbuka dengan suasana yang dapat meningkatkan produktivitas dalam belajar, berkolaborasi, dan bekerja. Co-Working Area di Evencio memiliki konsep open space yang sejuk dan mampu menciptakan interaksi sehingga dapat membuka peluang networking. Dengan fasilitas free Wi-Fi membuat area ini nyaman dan cocok sekali untuk millennials.



Evencio berada di jantung Kota Pendidikan terbesar se-Jabodetabek yaitu Jalan Margonda Raya Kota Depok. Dikelilingi oleh berbagai pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, serta rumah sakit dan dilengkapi berbagai fasilitas yang dapat menunjang seluruh kebutuhan millennials. Dilengkapi dengan JPO dan Halte tepat di halaman Evencio untuk memudahkan mobilisasi.

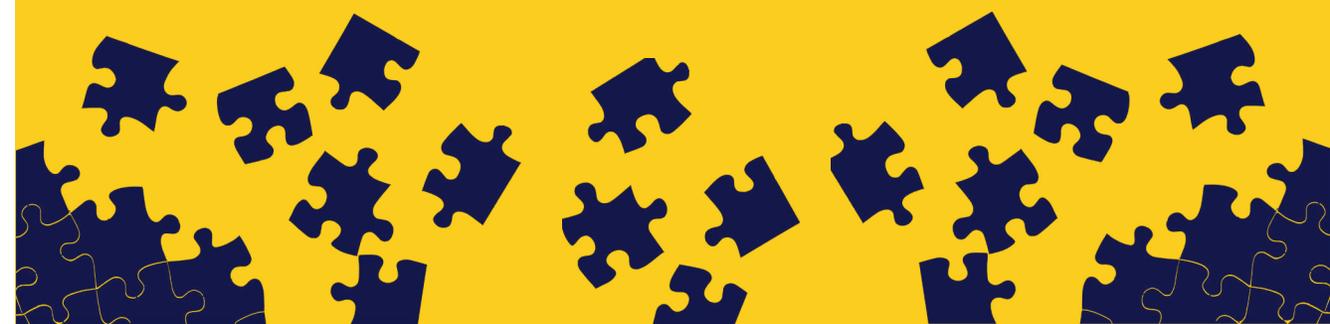


Graha Ksatria: Nyaman Tempatnya, Aman di Kantong

Bagi kalian yang ingin mencari kostan dekat UI dengan budget pas-pasan, kost Putra Graha Ksatria adalah pilihan tepat. Kost Graha Ksatria adalah kost putra yang terletak di Jl. Kabel No. 66, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok atau hanya 40 meter dari sebelah barat pagar UI. Kost ini menyediakan kamar berukuran 12 m² dengan teras berukuran 5 m² yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi. Kost ini juga menye-

diakan fasilitas pribadi mulai dari tempat tidur, 1 set meja belajar, lemari pakaian 2 pintu, jemuran hingga ember dan gayung. Selain itu, tersedia garasi motor dan mobil serta televisi dan dapur sebagai fasilitas umum. Terdapat dua pilihan kamar di Kost Graha Ksatria, yaitu kamar ber-AC dan kamar non-AC. Dilengkapi juga dengan fasilitas yang lengkap baik pribadi maupun umum, kamar ber-ac hanya dibandrol seharga Rp. 1.000.000,- per bulan. Pilihan lebih murah dengan fasilitas serupa jatuh pada kamar non-ac yang dibandrol seharga Rp. 600.000,- per bulannya. Sayangnya, saat ini kost hanya tersedia khusus laki-laki sehingga perempuan selain keluarga tidak boleh masuk kamar dan menginap. Tunggu apa lagi? yuk, pesan sebelum kehabisan.

**Perjalanan Gerbatama tidak akan berhenti sampai disini.
Ayo bantu kami, menjadi lebih baik dengan mengisi
survei dibawah ini:**





suara mahasiswa



@sumai



Suma Talks



Suara Mahasiswa UI